



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023-2026



**SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BANTEN**



BIRO ADPIMPRO

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	2
1.3 Landasan Hukum	2
1.4 Maksud dan Tujuan	4
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN	
2.1 Tugas, Fungsi dan Susunan Struktur Organisasi	7
2.1.1 Kedudukan	7
2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	7
2.1.3 Susunan Struktur Organisasi	10
2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Provinsi Banten	14
2.2.1 Sumber Daya Aparatur	14
2.2.2 Sarana dan Prasarana	20
2.3 Kinerja Pelayanan Sekertariat Daerah Provinsi Banten	22
2.4 Pencapaian Kinerja Sekertariat Daerah	28
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Banten	59
3.2 Telaahan Visi dan Misi RPJPD Provinsi Banten ..	66
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga	68
3.4 Penentuan Isu Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten	68
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Banten	70

4.2 Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Banten	71
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	73
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA KERANGKA PENDANAAN	79
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .	93
BAB VIII PENUTUP	95

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Data Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Banten	15
Tabel 2.3 Jumlah dan Distribusi Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2021	15
Tabel 2.4 Jumlah PNS dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Berdasarkan Tingkat Pendidikan sampai dengan Desember 2021	17
Tabel 2.5 Jumlah PNS dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Berdasarkan Golongan dan Ruang sampai dengan Tahun 2021	18
Tabel 2.6 Daftar Inventaris Aset Sekretariat Daerah Provinsi Bante	20
Tabel 2.7 Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat aerah Provinsi Banten	22
Tabel 2.8 Capaian Indikator Kinerja Program Sekretariat Daerah Provinsi Banten	23
Tabel 2.9 Rincian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Banten	29
Tabel 2.10 Capaian Indikator TPB/SDGs Sekretariat Daerah Provinsi Banten	53
Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten	54
Tabel 2.12 Analisis IFAS (<i>internal factor analysis strategy</i>) dan Analisis EFAS (<i>eksternal factor analysis strategy</i>).....	55
Tabel 2.13 Analisis EFAS dan IFAS	57
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Setda Provinsi Banten .	59
Tabel 4.1 Sandingan Tujuan Dan Sasaran Daerah Dengan Tujuan Dan Sasaran Sekretariat Daerah	71
Tabel 5.1 Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Sekretariat daerah Provinsi Banten tahun 2023–2026	75
Tabel 6.1 Rencana program dan kegiatan, serta Kerangka pendanaan	79
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provins Banten	93
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Mengacu Pada Sasaran Dan Tujuan RPD Banten	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi 13

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur Kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat karunia serta Ridho-Nya Dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 telah dapat tersusun.

Sebagaimana diketahui bahwa Perubah Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten ini disusun untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi daerah yang sudah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja pelayanan Pemerintah Daerah RPD, serta merupakan salah satu dokumen perencanaan yang menggambarkan inventarisasi dari keseluruhan program dan kegiatan tujuh (7) biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini akan disesuaikan kembali berdasarkan Pagu Indikatif Anggaran yang ditetapkan bagi masing-masing biro sehingga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) selama periode tahun 2023-2026.

Akhirnya, kami berharap dengan tersusunnya Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 dapat menjadi pedoman bagi setiap unit kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten dalam melaksanakan kebijakannya secara konsisten, sinergis, efisien dan efektif, serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih.

Wassalammu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Serang, Maret 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH



Dr. Ir. MOCH. TRANGGONO, M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP.19631210 199003 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan terbitnya Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Yang Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, maka Sekretariat Daerah Provinsi Banten harus menyusun dokumen perencanaan empat tahun, yaitu Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026. Dokumen Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk menjamin konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai upaya pencapaian indikator kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPD Provinsi Banten 2023 – 2026, buku Renstra memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Fokus/Bidang Urusan, Indikator Kinerja sebagaimana tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mewujudkan kebijakan pembangunan Provinsi Banten di bidang Penyusunan Kebijakan dan Pengoordinasian Administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Perubahan Renstra Sekretariat Daerah juga didasari dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur No 45 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian tugas Sekretariat Daerah. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian beberapa hal yang terkait dengan tujuan, strategi, arah kebijakan, sasaran dan indikator kinerja.

Sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Dokumen RENSTRA Perangkat Daerah mencakup :

- 1). Pendahuluan;
- 2). Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- 3). Permasalahan dan Isu- Isu Strategis Perangkat Daerah;

- 4). Tujuan dan Sasaran;
- 5). Strategi dan Arah Kebijakan;
- 6). Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
- 7). Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- 8). Penutup.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah disusun melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan hingga penyusunan rancangan akhir Renstra.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah berpedoman pada RPD Provinsi Banten 2023 – 2026. Keterkaitan antara Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023–2026 dengan RPD Provinsi Banten 2023–2026 dapat dilihat pada Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Provinsi Banten sebagai upaya pencapaian sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Banten dalam mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan visi, misi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan.

Dalam dokumen Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 dijabarkan rencana kerja tahunan yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja seluruh biro di lingkungan Sekretariat Daerah. Dokumen Renstra juga berfungsi dalam pengendalian untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama periode 2023-2026.

1.2. Landasan Hukum

Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023–2026 disusun berlandaskan pada peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang

- pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomen Klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Yang Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten
 15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
 16. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;

1.3. Maksud Dan Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 dimaksudkan untuk menyesuaikan perubahan yang diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023–2026 adalah:

1. Menyusun penyesuaian strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
3. Sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan penganggaran Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023–2026, disusun melalui sistematika sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II. Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Banten, mengurai tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Banten

BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten, mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Banten, telaahan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih.

BAB IV. Tujuan dan Sasaran, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan, berisi strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten, berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, mengemukakan indikator kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang akan dicapai dalam 4 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Banten Tahun 2023–2026

BAB VIII. Penutup, berisi ringkasan Renstra serta langkah-langkah dan upaya yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023–2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Kedudukan

Kedudukan Sekretariat Daerah Provinsi Banten menurut Pasal 2 pada point (a) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten menyebutkan bahwa “Sekretariat Daerah Provinsi Banten merupakan Sekretariat Daerah Tipe A“ dan berdasarkan Peraturan Gubernur Banten No. 45 tahun 2022 Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dan pada ayat (2) menyebutkan “Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur”, Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Asisten Daerah”.

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten No. 45 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 15 ayat 1 berbunyi : Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, dalam menyelenggarangkan fungsinya sebagai tercantum dalam pasal 15 ayat (2) berbunyi : point (a) pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, point (b) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, point (c) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, point (d) pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada

instansi Daerah, dan point(e) pengoordinasian pelaksanaan tugas Staf Ahli, point (f) pelaksanaan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. dan pada ayat (3) Pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (f) antara lain Sekretaris Daerah sebagai Sekretaris Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asisten Pemerintahan umum dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana melaksanakan tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan, pengoordinasian penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, serta pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum.

Asisten Pembangunan, Perekonomian dan Pengadaan melaksanakan tugas pokok membantu Sekretaris Daerah pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah, melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, pengadaan barang dan jasa serta administrasi pembangunan.

Asisten Administrasi Umum melaksanakan tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pimpinan, umum dan organisasi.

Biro Pemerintahan dan Otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat.

Biro Hukum mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi dan koordinasi hukum.

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pembangunan, Perekonomian dan Pengadaan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan pembangunan serta kebijakan administrasi pembangunan.

Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pembangunan, Perekonomian dan Pengadaan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa.

Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, materi dan komunikasi pimpinan, serta protokol.

Biro Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum dan keuangan, pengelolaan barang milik daerah, serta Rumah Tangga Pimpinan.

Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g, mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penataan organisasi.

2.1.3. Susunan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2022 Lampiran I disebutkan bahwa bentuk susunan organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 - 1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - 2. Biro Hukum.
- c. Asisten Pembangunan, Perekonomian dan Pengadaan membawahkan:
 - 1. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
 - 2. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
 - 1. Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol;
 - 2. Biro Umum dan Perlengkapan;
 - 3. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
- d. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Susunan Organisasi Biro Hukum, terdiri atas :

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

- e. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Susunan organisasi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, terdiri atas:

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Susunan organisasi Pengadaan/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, terdiri atas:

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- d. Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
- e. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pengendalian; dan
- f. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Susunan organisasi Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol, terdiri atas :

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah;
- c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- d. Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan;
- e. Kepala Bagian Protokol; dan
- f. Jabatan Fungsional dan Pelaksana

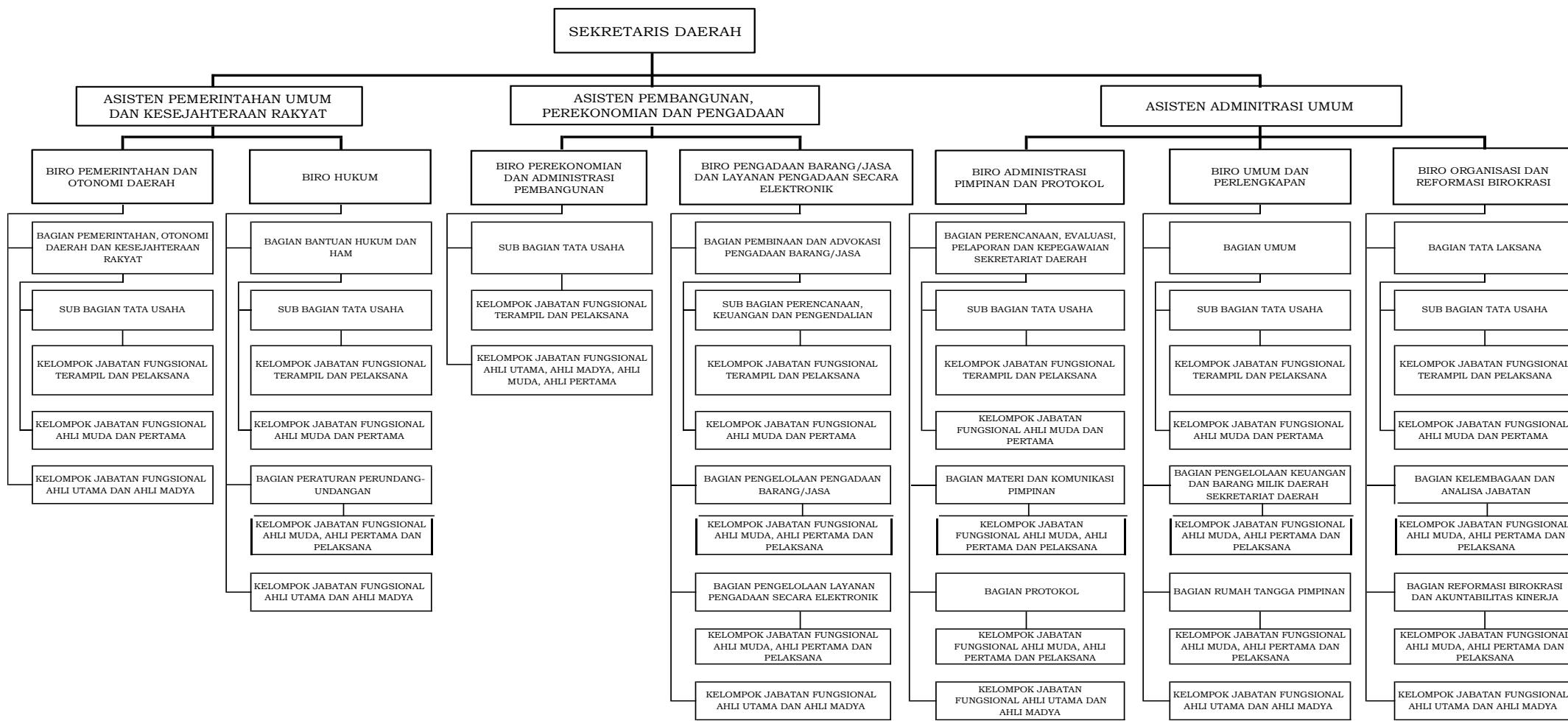
Susunan organisasi Biro Umum dan Perlengkapan, terdiri atas :

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian Umum;
- c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- d. Kepala Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah;
- e. Kepala Bagian Rumah Tangga Pimpinan; dan
- f. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

**Susunan organisasi Biro Organisasi dan Reformasi
Birokrasi, terdiri atas :**

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian Tatalaksana;
- c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- d. Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
- e. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja;
- f. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI



Sumber Data : Peraturan Gubernur No. 45 Tahun 2022

2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah Provinsi Banten

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan peran Sekretariat Daerah Provinsi Banten, yaitu keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, sebagai penentu keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan peran Sekretariat Daerah dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Dengan SDM yang berpendidikan tinggi, Sekretariat Daerah diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas lembaga dan unit kerja secara lebih baik.

Pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga Kerja Kontrak (TKK), Tenaga Kerja Sukarela (TKS), dan Tenaga Harian Lepas (THL) yang dikelola atau bekerjasama dengan perusahaan labour supply, untuk pekerjaan seperti cleaning service, pramusaji, dan pekerjaan-pekerjaan pelayanan lainnya.

Jabatan yang ada di Sekretariat daerah Provinsi Banten terdapat dua jenis Jabatan, yaitu Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional. Jabatan Struktural terdiri dari Jabatan Struktural eselon I b, Eselon II a, Eselon II b, Eselon III a, Eselon IV a, serta Jabatan Fungsional Umum (Staf/Pelaksana). Sedangkan Jabatan Fungsional antara lain Arsiparis, Pranata Komputer, Analis Jabatan, Pustakawan Setda, Analis Kepegawaian Setda. Namun jabatan fungsional tersebut belum terakomodir baik status kepegawaian maupun administrasi kepegawaiannya.

Komposisi pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten sampai dengan Tahun 2022 berdasarkan Status kepegawain, jenis kelamin, tingkat pendidikan formal dan pangkat golongan/ruang sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Data Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi
Banten

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	Keterangan
1	Laki-laki	249 401	PNS Non PNS
2	Perempuan	120 177	PNS Non PNS
4	Jumlah Keseluruhan	650+297 = 947	Pegawai Setda

Sumber Data : Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2022

Tabel 2.3
Jumlah dan Distribusi Pegawai Sekretariat
Daerah Provinsi Banten Tahun 2022

No	Struktur Jabatan/kepegawaian	Kondisi saat ini		
		Jumlah	Status	Pendidikan
1	Sekretaris Daerah			
2	Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat	1	PNS	S2
	a. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah			
	- Kepala Biro	1	PNS	S2
	- Kepala Bagian Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kesejahteraan Rakyat	1	PNS	S3
	- Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	PNS	S2
	- Kelompok Jabatan Fungsional	12	PNS	-
	- Pelaksana	48 50	PNS Non PNS	
	b. Biro Hukum			
	- Kepala Biro Hukum	1	PNS	S2
	- Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan	1	PNS	S1
	- Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia	1	PNS	S3
	- Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1		-
	- Kelompok Jabatan Fungsional	12	PNS	
	- Pelaksana	26 6	PNS Non PNS	-
3	Asisten Pembangunan, Perekonomian dan Pengadaan	1	PNS	S3

	a. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan			
	- Kepala Biro			
	- Kepala Sub Bagian Tata Ussaha	9	PNS	-
	- Kelompok Jabatan Fungsional	10		
	- Pelaksana	33 54	PNS Non PNS	-
	b. Biro Pengadaan Barang/Jasa			
	- Kepala Biro	1	PNS	S2
	- Kepala Bagian Pengelolaan Barang/Jasa	1	PNS	S2
	- Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1	PNS	S2
	- Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1	PNS	S2
	- Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pengendalian	1	PNS	-
	- Kelompok Jabatan Fungsional	69	PNS	-
	- Pelaksana	60	Non PNS	-
4	Asisten Administrasi Umum			
	a. Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol			
	- Kepala Biro	1	PNS	S2
	- Kepala Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah	1	PNS	S2
	- Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan	1	PNS	S2
	- Kepala Bagian Protokol	1	PNS	S1
	- Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	PNS	-
	- Kelompok Jabatan Fungsional	8	PNS	
	- Pelaksana	37 76	PNS Non PNS	-
	b. Biro Umum dan Perlengkapan			
	- Kepala Biro Umum dan Perlengkapan		PNS	S2
	- Kepala Bagian Kepala Bagian Umum	1	PNS	S2
	- Kepala Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah	1	PNS	S2
	- Kepala Bagian Rumah Tangga Pimpinan	1	PNS	S2

	- Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	PNS	-
	- Pelaksana	43 322	PNS Non PNS	-
	- Kelompok Jabatan Fungsional	11	PNS	-
	c. Biro Organisasi dan Reformasi dan Birokrasi			
	- Kepala Biro			
	- Kepala Bagian Tatalaksana	1	PNS	S2
	- Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan	1	PNS	S2
	- Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	1	PNS	S2
	- Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	PNS	-
	- Kelompok Jabatan Fungsional	8		
	- Pelaksana	24 10	PNS Non PNS	-

Sumber Data : Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2022

Tabel 2.4
Jumlah PNS Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sampai dengan Desember 2022

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan										Jumlah
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SM U	SM P	SD	
1	Sekretaris Daerah.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Asisten pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat	1	39	49	0	1	1	0	14	0	0	105
3	Asisten Pembangunan, Perekonomian dan Pengadaan	2	31	61	2	5	0	0	18	2	0	119
4	Asisten Administrasi Umum	4	47	56	0	10	0	0	26	0	0	143
5	Staf Ahli Pemerintahan , Politik dan Hukum	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

6	Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi Dan Keuangan	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
7	Staf Ahli Kemasayarakatan dan Sumber Daya Manusia	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Jumlah	6	120	166	0	16	1	0	58	2	0
	Jmh Per strata		29 2			1 7			61		369
	% Jumlah	1.63 2	32.5	44.99	0	4.347	0,27	0	15,72	0,54	0
	% Per strata		79,13			4,61			16,26		100

Sumber Data : Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2022

Dari tabel 2.4 di atas terlihat bahwa pegawai yang telah mendapatkan pendidikan akademik pada perguruan tinggi untuk sarjana maupun Pascasarjana sebanyak 292 orang atau 79,13%, Diploma I sampai dengan Diploma IV sebanyak 17 orang atau 4,61%. Dan sisanya SLTA kebawah sebanyak 61 orang atau 16,26%. Persentase tersebut cukup baik, namun demikian hal tersebut belum sepenuhnya menjamin kompetensi dan profesionalisme sehingga upaya peningkatan SDM harus terus ditingkatkan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun manajerial. Di samping itu peningkatan jenjang pendidikan akademik pegawai ke tingkat yang lebih tinggi harus terus dilakukan.

Sedangkan komposisi Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten berdasarkan golongan dan ruang sebagaimana tercantum pada tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.5
Jumlah PNS Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Berdasarkan Golongan dan Ruang Sampai dengan Tahun 2012

No	Unit Kerja	GOLONGAN DAN RUANG																Jumlah
		I				II				III				IV				
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	E
1	Sekretaris Daerah.																	

2	Asisten pemerintah anUmum dan Kesehinggaan Rakyat	0	0	0	0	1	8	0	2	5	11	21	33	19	3	1	1	0	105
3	Asisten Pembangunan Perekonomian dan Pengadaan	0	0	0	2	0	5	3	3	5	24	3 2	28	1 3	2	2	1	0	119
4	Asisten Administrasi Umum	0	0	0	0	0	17	1	8	9	19	3 0	37	1 4	5	2	1	0	142
5	Staf Ahli Pemerintahan, Politik dan Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
6	Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
7	Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
Jumlah		0	0	0	2	1	30	4	13	18	54	83	98	46	10	5	4		369
Jmh Per strata		2		48				253				66							
% Per strata		0,54		13,01				68,56				17.89				100			

Sumber Data : Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2022

Berdasarkan tabel 2.5 di atas terlihat bahwa Pegawai Negeri Sipil Golongan I sejumlah 2 orang atau 0,54%, PNS Golongan II sejumlah 48 Orang atau 13,01% ,PNS golongan III sejumlah 253 orang atau 68,56% dan PNS Golongan IV sejumlah 66 orang atau 17.89% dari jumlah seluruh PNS dilingkungan Setda Provinsi Banten. Dalam tataran organisasi dan manajemen pemerintahan, seyogyanya komposisi jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan ruang berjenjang membentuk piramida, dalam arti pangkat dan golongan ruang terendah lebih banyak dibandingkan pegawai yang berpangkat dan golongan ruang yang lebih tinggi. Pada lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten menunjukan bahwa komposisi PNS golongan III lebih banyak dari PNS golongan II. Hal ini akan mengakibatkan kesulitan dalam jenjang karier PNS yang bersangkutan. Di sisi lain banyaknya PNS golongan III menunjukan masa kerja dan atau tingkat pendidikan setara dengan Strata 1, namun demikian hal tersebut belum sepenuhnya menjamin kompetensi dan profesionalisme PNS. Untuk itu dimasa datang diperlukan aturan yang lebih selektif tentang pangkat dan golongan

ruang PNS, sehingga komposisi pangkat dan golongan ruang PNS ideal dan proporsional.

2.2.2. Sarana Dan Prasarana

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Banten diperlukan sarana dan prasarana penunjang. Adapun sarana dan prasarana penunjang atau aset yang dimiliki Sekretariat Daerah Provinsi Banten terdiri dari benda berat dan tidak bergerak, sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6
Daftar Inventaris Aset Sekretariat Daerah
Provinsi Banten

No	Nama/jenisbarang	Jumlah barang	Kondisi barang		Ket
			Baik	Kurang Baik	
A.	Aset tetap				
	Tanah	25	✓		
	Peralatan dan Mesin	13.145	✓	✓	
	Gedung dan Bangunan	103	✓		
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	62	✓		
B.	Aset Tetap Lainnya	14.501			
	Konstruksi dalam Pengerjaan	3	✓		
C.	Alat – Alat Angkutan				
	Bus Besar	5	✓		
	Bus Sedang	5	✓		
	Mini Bus	201	✓	✓	
	Truk	3	✓		
	Pick Up	19	✓		
	Jeep	81	✓		
	Sepeda Motor	219	✓	✓	
D	Alat Bengkel dan Alat Ukur		✓	✓	
E	Alat Kantor				
	Kamera Film	119	✓		
	Mesin Hitung	14	✓		
	Alat Reproduksi Penggandaan	39	✓		

	Alat Penyimpanan perlengkapan kantor	1.152	✓	✓	
	Alat Kantor lainnya	1.472	✓	✓	
F	Alat Rumah tangga				
	Meubelier	2.821	✓	✓	
	Alat Pendingin	582	✓	✓	
	Alat Rumah tangga lainnya	650	✓	✓	
G	Peralatan Komputer	1.200	✓	✓	
H	Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat		✓	✓	
	Meja Kerja Pejabat	202	✓	✓	
	Kursi Pejabat	384	✓	✓	
	Kursi hadap depan meja kursi Pejabat	131	✓	✓	
	Lemari dan Arsip Pejabat	599	✓	✓	
I	Alat audio dan Alat Komunikasi				
	Peralatan Studio Visual	740	✓	✓	
	Alat Komunikasi Telepon	402	✓	✓	
J	Alat Laboratorium				
	Alat Laboratorium Buatan / Geologi				
	Alat Laboratorium Mikrobiologi				
	Alat Laboratorium Alat Pertanian A				
	Peralatan Laboratorium Hydrodinamika				
	Peralatan umum				
	Permesinan : Model ship Workshop				
	Aset Tetap Lainnya				
	Buku dan Perpustakaan buku				
	Tertbitan		✓		
	Ekstrakomptabel	6.473	✓		
K	Aktiva Tak Berwujud	21	✓		

Sumber Data : Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2022

Kondisi sarana dan prasarana di Sekretariat Daerah Provinsi Banten cukup beragam dan sebagian besar berada

dalam kondisi baik. Meskipun demikian, terdapat pula sarana dan prasarana yang kurang baik kondisinya maupun jumlah yang kurang memadai.

Melihat kondisi kantor Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang letaknya berada di Kantor Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B), dimana sebagian Biro terpisah gedung dengan induknya Sekretariat Daerah. Hal ini menghambat dan memperlambat koordinasi dan konsultasi baik tingkat bawah maupun tingkat atas.

Disamping itu perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang dapat menunjang terhadap kebutuhan peningkatan kinerja aparatur Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Dari beberapa sarana penunjang yang belum memadai seperti kebutuhan sarana penunjang rapat dan ruang rapat, personal komputer, serta sarana dan prasarana lainnya.

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Secara garis besar sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Banten, pencapaian kinerja pelayanan dari sisi *outcome* dan *impact* selama tahun 2017-2022 atau selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Banten

NO	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	CAPAIAN 2018	CAPAIAN 2019	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022	KET
1	Presentase realisasi produk hukum daerah dan HAM yang terpublikasi	100	100	100	100	100	Biro Hukum
2	Presentase manajemen reformasi birokrasi	100	100	100	100	91	Biro Organisasi dan RB
3	Presentase peningkatan pelayanan umum yang prima	100	100	100	100	100	Biro Umum
4	Presentase realisasi layanan dan administrasi pembangunan daerah	100	100	100	100	100	Biro Ekbang

5	Capaian kebijakan perekonomian daerah	100	100	100	100	100	Biro Ekbang
6	Presentase peningkatan pelayanan fasilitasi pimpinan	100	100	100	100	100	Biro Adpim
7	Presentase realisasi kebijakan kerjasama pemerintahan	NA	NA	95	100	100	Biro Pemkesra
8	Capaian LPPD	NA	NA	100	100	100	Biro Pemkesra
9	Persentase Rumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah	100	87,5	100	100	100	Biro Pengadaan Barang/Jasa

Sumber Data : Evaluasi Renstra Setda Provinsi Banten Tahun 2017-2022

Dari penjabaran Tabel 2.7, dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja utama pada Sekretariat Daerah dari Tahun 2018-2022 dapat tercapai dengan baik. Hal ini seluruh Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah dapat mencapai target, meskipun ada perubahan struktur organisasi pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten, yaitu pada Tahun 2020 terjadi perampingan struktur organisasi dari 9 biro menjadi 7 biro. Dan ada biro yang baru yaitu Biro Pengadaan Barang/Jasa, yang secara selaras menggantikan indikator kinerja utama dari Biro Bina Infrastruktur Daerah.

Tabel 2.8
Capaian Indikator Kinerja Program Sekretariat Daerah Provinsi Banten

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						
		Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Biro Administrasi Pimpinan) (Satuan : %)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Percentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN				
			2018	2019	2020	2021	2022
		administrasi perangkat daerah (Biro Administrasi Pimpinan) (Satuan : %)					
		Capaian % kinerja Pelayanan Keprotokolan (Satuan : %)	90 %	90 %	90 %	100 %	100 %
		Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Satuan : %)	N/A	N/A	N/A	100	100
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Satuan : %)	N/A	N/A	N/A	95,83	95,83
		Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Satuan : %)	N/A	N/A	N/A	100	100
		Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Biro Organisasi dan RB) (Satuan : %)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Biro Perekonomian dan ADPEM) (Satuan : %)	100	100	100	100	100
		Persentease Terwujudnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD pada Biro Pengadaan Barang/Jasa (Satuan : %)	N/A	N/A	N/A	N/A	75
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Biro Perekonomian dan ADPEM) (Satuan : %)	100	100	100	100	100
		Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Biro Perekonomian dan ADPEM) (Satuan : %)	100	100	100	100	100

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN				
			2018	2019	2020	2021	2022
		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Biro Perekonominan dan ADPEM) (Satuan : %)	100	100	100	100	100
		Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Biro Organisasi dan RB) (Satuan : %)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Biro Organisasi dan RB) (Satuan : %)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Biro Organisasi dan RB) (Satuan : %)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Biro Organisasi dan RB) (Satuan : %)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Satuan : %)	100	100	100	100	100
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Satuan : %)	100	100	100	100	100
		Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Satuan : %)	100	100	100	100	100
		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD pada Biro Pemerintahan dan	100	100	100	100	100

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN				
			2018	2019	2020	2021	2022
		Kesejahteraan Rakyat (Satuan : %)					
		Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Biro Hukum) (Satuan : %)	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Biro Hukum) (Satuan : %)	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Biro Hukum) (Satuan : %)	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Biro Hukum) (Satuan : %)	100%	100%	100%	100%	100%
		Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Biro Umum) (Satuan : %)	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Biro Perekonomian dan ADPEM) (Satuan : %)	100	100	100	100	100
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Biro Umum) (Satuan : %)	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Satuan : %)	-	-	-	-	-
		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Biro Umum) (Satuan : %)	100%	100%	100%	100%	100%

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN				
			2018	2019	2020	2021	2022
		Persentase Prasarana dan sarana penunjang kinerja di Lingkungan Setda dalam kondisi baik (Satuan : %)	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Biro Umum) (Satuan : %)	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase terwujudnya penataan usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Biro Perekonomian dan ADPEM) (Satuan : %)	100	100	100	100	100
		Persentase Prasarana dan sarana penunjang kinerja di Lingkungan Setda dalam kondisi baik (Satuan : %)	100%	100%	100%	100%	100%
2	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah						
		presentase realisasi kebijakan administrasi kewilayahana (Satuan : %)	100	100	100	100	100
		presentase realisasi kebijakan kerjasama pemerintahan (Satuan : %)	50	50	100	100	100
		presentase realisasi kebijakan administrasi pemerintahan dan otonomi daerah (Satuan : %)	100	100	100	100	100
3	Program Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Keselarasan Rumusan Kebijakan Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Keluarga (Satuan : %)	100	100	100	100	100
		Cakupan Keselarasan Rumusan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat (Satuan : %)	100	100	100	100	100
		Cakupan Keselarasan Rumusan Kebijakan Bidang Sosial dan Keagamaan (Satuan : %)	100	100	100	100	100
4	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Presentase Fasilitasi keselarasan peraturan perundungan daerah atau Kabupaten/ Kota dengan regulasi hukum nasional (Satuan : %)	100%	100%	100%	100%	100%
		Presentasi pelayanan bantuan hukum (Satuan : %)	100%	100%	100%	100%	100%

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN				
			2018	2019	2020	2021	2022
		Presentase realisasi target propemperda (Satuan : %)	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sosialisasi dan Dokumentasi Produk Hukum (Satuan: %)	100%	100%	100%	100%	100%
5	Program Penataan Organisasi	persentase ketercapaian kebijakan penataan kelembagaan (Satuan : %)	100 %	100 %	100 %	100 %	98.53 %
		Persentase Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemda (Satuan : %)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Capaian Standar LPSE dalam Penyelenggaraan Sistem Layanan Pengadaan (Satuan : Jumlah)	0	9	12	13	17
		Presentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa dan Kebijakan Administrasi Pembangunan (Satuan : %)	75	80	85	90	90
		Presentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa dan Kebijakan Administrasi Pembangunan (Satuan : %)	83,33	71,43	50,00	70,00	62,50
		Persentase Rumusan kebijakan di bidang infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Satuan : %)	-	-	-	-	-
7	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Kebijakan Industri Jasa dan Ketenagakerjaan (Satuan : Dokumen)	11	11	9	9	3
		Jumlah Dokumen Kebijakan Produksi Daerah (Satuan : Dokumen)	9	9	11	11	9
		Jumlah Dokumen Kebijakan Sarana Perekonomian (Satuan : Dokumen)	8	8	8	9	7
8	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase keselarasan kebijakan di bidang Admiistrasi Pembangunan (Satuan : %)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Presentasi Realisasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan (Satuan : %)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber data: Evaluasi Renten 2017-2022

2.4 Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah

Kinerja pelayanan Urusan Kepegawaian oleh Sekretariat Daerah Provinsi Banten selama periode tahun 2017-2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.9
Rincian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Provinsi Banten

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

No	Jenis Pelayanan	Jumlah/Tahun						Total
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Peraturan Gubernur	2	2	2	2	2	2	12

Sumber Data: Biro Ekbang

Keterangan

1. Peraturan Gubernur Banten Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Tentang Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017;
2. Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017;
3. Peraturan Gubernur Banten Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten No. 55 Tahun 2017 Tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018;
4. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018;
5. Pergub Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa Tahun 2019;
6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Gubernur nomor 23 Tahun 2019 Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun 2020;

-
8. Peraturan Gubernur nomor 27 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2020;
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Biro Hukum

No	Jenis Pelayanan	Jumlah/Tahun						Total
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Peraturan Gubernur	-	-	-	-	72	59	131
2	Intruksi Gubernur	-	-	-	-	38	0	38

Sumber Data: Biro Hukum

Sumber Data: Biro Hukum

Keterangan yang ditampilkan data Tahun 2022

1. Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

2. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
3. Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
4. Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketigabelas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022
5. Peraturan Gubernur Banten Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Khusus Negeri di Provinsi Banten
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Satuan Provinsi Banten Tahun

Anggaran 2022

10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Banten
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2023
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Biaya Penunjang Operasional Kepada Penjabat Gubernur
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Eliminasi Malaria
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tanggungjawab Sosial Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2022
17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Satuan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022
18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2022 tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

19. Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kebijakan Efektifitas Pengendalian Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
20. Peraturan Gubernur Banten Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
21. Peraturan Gubernur Banten Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Provinsi Banten
22. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
23. Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengurangan Pokok dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua, dan Seterusnya dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
24. Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Daerah
25. Peraturan Gubernur Banten Nomor 26 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2022-2024
26. Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
27. Peraturan Gubernur Banten Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur

- Banten Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun 2022
28. Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
 29. Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Untuk Masyarakat Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022
 30. Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Banten nomor 11 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Provinsi Banten.
 31. Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Banten
 32. Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023.
 33. Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
 34. Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten

35. Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur
36. Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan
37. Peraturan Gubernur Banten Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
38. Peraturan Gubernur Banten Nomor 41 Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian kerja.
39. Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Tarif Jarak Batas Atas Dan Tarif Jarak Batas Bawah Kendaraan Bis Umum Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Wilayah Provinsi Banten.
40. Peraturan Gubernur Banten Nomor 43 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2022.
41. Peraturan Gubernur Banten Nomor 44 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
42. Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
43. Peraturan Gubernur Banten Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata

Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

44. Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Badan Daerah.
45. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Daerah.
46. Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian tugas, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah.
47. Peraturan Gubernur Banten Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Peraturan Internal Rumah sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum daerah Banten.
48. Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota Tahun 2022-2042.
49. Peraturan Gubernur Banten Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Rumah Sakit Umum daerah Banten Tahun 2023-2026.
50. Peraturan Gubernur Banten Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
51. Peraturan Gubernur Banten Nomor 54 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Kepada Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Retribusi.
52. Peraturan Gubernur Banten Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

53. Peraturan Gubernur Banten Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perlindungan Hukum dan Pelayanan Kesehatan Bagi Aparatur Sipil Negara.
54. Peraturan Gubernur Banten Nomor 57 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023.
55. Peraturan Gubernur Banten Nomor 58 Tahun 2022 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif
56. Peraturan Gubernur Banten Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kajian Risiko Bencana.

Biro Umum

No	Jenis Pelayanan	Jumlah/Tahun						Total
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Pelayanan Kerumah tanggaan Setda	-	-	-	-	12	12	24
2	Terdistribusinya Kebutuhan Atk	12	12	12	12	12	12	72
3	Terdistribusinya Kebutuhan APK	4	4	4	4	4	4	24
4	Perlamaran Kearsipan	4	4	4	4	4	4	24
5	Perlamaran Distribusi Surat	19.337	16.389	14.991	14.299	11.945	18.954	95.917

Sumber Data: Biro Umum

Biro Administrasi Pimpinan

No	Jenis Pelayanan	Jumlah/Tahun						Total
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Penyiapan Materi Pimpinan	-	-	-	-	235	243	478
2	Komunikasi Pimpinan	-	-	-	-	1.709	3.129	4.838
3	Keprotokolan	622	754	986	553	726	837	4.478
4	Dokumentasi Kegiatan Pimpinan	588	596	575	340	455	717	3.271
5	Kepegawaian Setda							
	- Kenaikan Pangkat Pegawai	-	-	-	-	42	97	139
	- Kenaikan Gaji Berkala Pegawai	-	-	-	-	207	139	446

	- Cuti Pegawai	-	-	-	-	31	98	129
--	----------------	---	---	---	---	----	----	-----

Sumber Data: Biro Administrasi Pimpinan

Keterangan

Jenis pelayanan komunikasi pimpinan tahun 2022	Jumlah
Pelayanan komunikasi pimpinan	
1. Press release	875
2. Infographis	415
3. Media luar ruang	57
4. Media cetak lokal	154
5. Media cetak Nasional	19
6. Media radio	400
7. Advertorial/liputan khusus/greeting tv lokal	90
8. Filler/spot news tv nasional	22
9. Media Online Lokal	850
10. Media Online nasional	214
11. E-magazine menara Banten	12

Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

No	Jenis Pelayanan	Jumlah/Tahun						Total
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Peraturan Gubernur	-	2	4	5	2	5	18

Sumber Data: Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Keterangan

1. Pergub Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
2. Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2018 Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada perangka Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
3. Pergub Nomor 31 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;

4. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019 Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional dan Jabatan Lainnya Aparatir Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
5. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Jabatan Administrator Dan Pengawas Pada Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
6. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2019Analisis Jabatan dan Analisii Beban Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
7. Pergub Nomor 27 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten;
8. Pergub Nomor 42 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi,Tipe, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerahprovinsi Banten;
9. Pergub Nomor 58 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi,Tipe, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerahprovinsi Banten;
10. Peraturan Gubernur 43 tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Dan Pengawas Perangkat Daerah;
11. Peraturan gubernur banten nomor 59 tahun 2020 Perubahan kedua atas peraturan gubernur banten nomor 38 tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas perangkat daerah;
12. Peraturan gubernur banten nomor 55 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan gubernur banten nomor 19 tahun 2018 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah di lingkungan

Pemerintah Provinsi Banten;

13. Peraturan gubernur banten nomor 44 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan gubernur banten nomor 35 tahun 2019 tentang analisis jabatan dan analisis beban kerja pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi banten.
14. Peraturan Gubernur Banten nomor 45 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, uraian tugas, dan tata kerja sekretariat daerah
15. Peraturan Gubernur Banten nomor 46 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, uraian tugas, dan tata kerja sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah
16. Peraturan Gubernur Banten nomor 47 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, uraian tugas, dan tata kerja badan daerah
17. Peraturan Gubernur Banten nomor 48 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, uraian tugas, dan tata kerja dinas daerah
18. Peraturan Gubernur Banten nomor 49 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, uraian tugas, dan tata kerja inspektorat daerah

Biro Pengadaan Barang/Jasa

No	Jenis Pelayanan	Jumlah/Tahun						Total
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Peraturan Gubernur	1	3	2	1	1	-	8
2	Keputusan Gubernur	1	-	-	-	-	3	3

Sumber Data: Biro Pengadaan Barang/Jasa

Keterangan

1. Peraturan Gubernur Banten Nomor 68 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Banten;
2. Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dan

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Di Provinsi Banten;

3. Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
4. Peraturan Gubernur Banten Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Wilayah Provinsi Banten;
5. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kode Etik Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Banten;
6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Dinas Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 54 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pegawai Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Langsung Barang/Jasa Melalui Aplikasi Bela Pengadaan Pemerintah Provinsi Banten;
9. Keputusan Gubernur Banten tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Tahun 2017-2024;
10. Keputusan Gubernur Banten Nomor 596/Kep.94-HUK/2022 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Ruas Palima – Baros (Lingkar Baros);
11. Keputusan Gubernur Banten Nomor 596/Kep.134-HUK/2022 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Simpang Gondrong Ruas Hasyim Ashari) Kota Tangerang;
12. Keputusan Gubernur Banten Nomor 596/Kep.364-HUK/2022 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Sempu-Dukuh Kawung (Cipocok-Boru).

Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No	Jenis Pelayanan	Jumlah/Tahun						Total
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Nota Kesepahaman (MOU)	25	3	4	4	14	8	58
2	Perjanjian Kerjasama	-	4	-	2	5	9	20

Sumber Data : Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Keterangan

1. Nomor MoU 339/MoU.2-Huk/2017 tentang Nota Kesepahaman antara Polda Banten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi Banten, Korem 064/ Maulana Yusuf, Kejati Banten, Lanal Banten, Detasemen TNI AU Gorda, Kanwil Kemenag Provinsi Banten, FKPI, BNNP, Kabinda, KNPI Provinsi Banten, UNTIRTA, IAIN SMHB dan UNSERA tentang Penerbitan dan Penegakan Hukum terhadap Gerakan Radikalisme, Terorisme dan Anti Pancasila di Wilayah Hukum Polda Banten;
2. Nomor MoU 349/MoU.3-Huk/2017 tentang Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Sumber Data Indonesia;
3. Nomor MoU 403/MoU.4-Huk/2017 tentang Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kota Serang dan Pemerintah Kabupaten Serang tentang Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya;
4. Nomor MoU 188.341/MoU.5-Huk/2017 tentang Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten tentang Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
5. Nomor MoU 188.600/MoU.6-Huk/2017 tentang Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah Daerah Provinsi Banten

- dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Bidang Transportasi, Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup, Energi, Pariwisata dan Ketahanan Pangan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Wilayah Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
6. Nomor MoU 188.600/MoU.7-Huk/2017 tentang Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta dan Pemerintah Daerah Provinsi Banten tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Bidang Transportasi, Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup, Energi, Pariwisata dan Ketahanan Pangan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Wilayah Provinsi Banten;
 7. Nomor MoU 585/MoU.8-Huk/2017 tentang Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, PT. Jasa Raharja (Persero) dengan Pemerintah Daerah Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, PT. Bank DKI, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. PT. Bank Central Asia Tbk. PT. Bank Permata Tbk. PT. Bank CIMB Niaga Tbk. tentang Layanan Samsat Online Nasional untuk Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor pada Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Ibukota

- Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali;
8. Nomor MoU 550/MoU.9-Huk/2017 tentang Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kota Depok, Pemerintah Kota Tangerang, Pemerintah Kabupaten Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Kabupaten Bekasi tentang Rencana Induk Transportasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
 9. Nomor MoU 180/MoU.10-Huk/2017 tentang Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Kejaksaan Tinggi Banten tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
 10. Nomor MoU 791/MoU.11-Huk/2017 tentang Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 11. Nomor MoU 791/MoU.12-Huk/2017 tentang Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 12. Nomor MoU 032/MoU.13-Huk/2017 tentang Berita Acara Serah Terima Personel, Sarana Prasarana dan Dokumen (P2D) Kota Tangerang Selatan dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada Pemerintah Provinsi Banten;
 13. Nomor MoU 032/MoU.14-Huk/2017 tentang Berita Acara Serah Terima Sarana Prasarana dan Dokumen Pemerintah Provinsi Banten dari Pemerintah Provinsi Banten Kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan;

14. Nomor MoU 100/MoU.15-Huk/2017 tentang Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Banten dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung tentang Kerjasama Pengembangan Smart City dan E-Government;
15. Nomor MoU 188.341/MoU.16-Huk/2017 tentang Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
16. Nomor MoU 188.341/MoU.17-Huk/2017 tentang Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
17. Nomor MoU 042.23/MoU.18-Huk/2017 tentang Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Banten tentang Kerjasama Pembangunan Ekonomi Daerah;
18. Nomor MoU 54/K1/HKM.03.1 tentang Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Lembaga Administrasi Negara tentang Penguatan Kapasitas Pemerintah Provinsi Banten Melalui Penyelenggaraan Kegiatan Kajian Kebijakan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Serta Inovasi Administrasi Negara
19. Nomor MoU 120.23/MoU.20-Huk/2017 tentang Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi antara Pemerintah Daerah;
20. Nomor MoU 120.23/MoU.21-Huk/2017 tentang Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo tentang Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi antara Daerah;
21. Nomor MoU 120.23/MoU.22-Huk/2017 tentang Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara tentang Kerjasama

- Pelaksanaan Transmigrasi antara Pemerintah Daerah;
22. Nomor MoU 120.23/MoU.23-Huk/2017 tentang Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tentang Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi antara Pemerintah Daerah;
23. Nomor MoU 120.23/MoU.24-Huk/2017 tentang Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi antara Pemerintah Daerah;
24. Nomor MoU 120.23/MoU.25-Huk/2017 tentang Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi antara Pemerintah Daerah;
25. Nomor MoU 550/MoU.26-Huk/2017 tentang Kesepakatan Bersama antara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dengan pemerintah Provinsi Banten tentang Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Penerbangan dan Antariksa;
26. Nomor MoU 001/APPSI/II/2018 tentang Kesepakatan Bersama Gubernur Seluruh Indonesia Selaku Anggota APPSI tentang Kerjasama Perdagangan Komoditas dan Produk Unggulan Antar Daerah;
27. Nomor MoU 120.23/MoU.02-Huk/2018 tentang Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Banten;
28. Nomor Perjanjian 120.23/Perj.01-Huk/2018 tentang Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Banten, dengan Kejaksaan Tinggi Banten dan Kepolisian Daerah Banten tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten;
29. Nomor Perjanjian 583.1/005-BPKAD/2018 tentang Perjanjian

<p>Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk tentang Penempatan Deposito Berjangka / Setara Kas;</p> <p>30. Nomor Perjanjian 583.1/006-BPKAD/2018 tentang Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk tentang Penempatan Deposito Berjangka / Setara Kas;</p> <p>31. Nomor Perjanjian 583.1/007-BPKAD/2018 tentang Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk tentang Penempatan Deposito Berjangka / Setara Kas;</p> <p>32. Nomor MoU 601/1/KR.III/X/2018 tentang Kesepakatan Bersama Antara BKN dengan Pemprov. Banten, Pemkot Cilegon, Pemkot Serang, Pemkot Tangerang, Pemkot Tangerang Selatan, Pemkab Lebak, Pemkab Pandeglang dan Pemkab Tangerang tentang Penyediaan Sarana Prasarana Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018 dengan Metode Computer Assitend Test BKN;</p> <p>33. Nomor MoU 120.23/MoU.03.Huk/2019 tentang Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Banten dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Kerja Sama Pembangunan Wilayah Perbatasan Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 – 2023;</p> <p>34. Nomor MoU 592.41/MoU.04-Huk/2019 tentang Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tentang Pendaftaran Tanah, Penanganan Permasalahan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Dimiliki/Dikuasai Pemerintah Provinsi Banten dan Pelaksanaan Program Strategis Nasional Bidang Pertanahan;</p> <p>35. Nomor Perjanjian 900/MoU.05-Huk/2019 tentang Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Taspen (Persero) tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGAJI) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah dan Pelayanan Proaktif;</p> <p>36. Nomor MoU 074/MoU.07-Huk/2019 tentang Nota Kesepahaman</p>
--

<p>Antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Institut Teknologi Bandung tentang Kerja Sama Di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat dan Pembangunan Di Provinsi Banten</p> <p>37. Nomor 074/MoU.06-Huk/VII/2020 tentang Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Universitas Indonesia tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pembangunan di Provinsi Banten;</p> <p>38. Nomor MoU 075/MoU.07-Huk/VII/2020 tentang Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tentang Pemberdayaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Serta Pengembangan Potensi Daerah;</p> <p>39. Nomor MoU 712/Mou.15-Huk/2020 tentang Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Banten tentang Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</p> <p>40. Nomor Perjanjian 573/PKS.13-Huk/2020 tentang Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Banten Global Development tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Banten Kepada PT. Banten Global Development Tahun Anggaran 2020;</p> <p>41. Nomor MoU 300/Mou.16-Huk/2020 tentang Nota Kesepahaman antara Kepolisian Daerah Banten dengan Pemerintah Provinsi Banten tentang Integrasi Closed Circuit Television (CCTV) Kepolisian Daerah Banten Dengan Pemerintah Provinsi Banten;</p> <p>42. Nomor Perjanjian 573.PKS.17-Huk/2020 tentang Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Banten Kepada PT. Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda) Tahun Anggaran 2020;</p> <p>43. Nomor Perjanjian PKS/1690/M.6/HK.1/10/2021 tentang</p>

<p>Perjanjian Kerjasama Antara Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Banten dan Inspektorat daerah Provinsi Banten tentang Pelaksanaan Pengawasan di wilayah Provinsi Banten;</p> <p>44. Nomor MoU MoU-1689/M.6/HK.1/10/2021 tentang Kesepakatan Bersama antara Kejati Banten dan Pemprov Banten tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi;</p> <p>45. Nomor Perjanjian 120.3/1251-Distan/2021 tentang Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Pertanian Provinsi Banten dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat Tentang Pengendalian penyakit hewan menular Strategis/Zoonosis, Pengawasan lalu lintas hewan serta penguatan pelayanan kesehatan hewan;</p> <p>46. Nomor MoU 470.2/mou.08-Huk/IV/2021 tentang Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dengan Pemerintah Provinsi Banten Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Di Provinsi Kalimantan Timur;</p> <p>47. Nomor MoU 470.2/mou.07-Huk/IV/2021 tentang Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dengan Pemerintah Provinsi Banten Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Di Provinsi Sulawesi Barat</p> <p>48. Nomor MoU 573/MoU.03-Huk/2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Banten kepada PT Agrobisnis Banten mandiri (Perseroda);</p> <p>49. Nomor MoU 074/MoU.01-Huk/II/2021 tentang Perjanjian Kerjasama antara Universitas Mathlaul Anwar Banten dengan Pendidikan, Penelitian ,dan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>50. Nomor MoU 183/MoU.02-Huk/III/2021 tentang Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Law Firm Abdullah Busro& partners;</p> <p>51. Nomor Perjanjian 183.1/PKS.01-Huk/III/2021 tentang Perjanjian Kerjasama antara Biro Hukum Sekertariat daerah Provinsi banten dengan Law Firm Abdullah Busro & Partners;</p> <p>52. Nomor MoU 188.341/MoU.04-Huk/2021 tentang Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten tentang Perubahan kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2021;</p>
--

53. Nomor MoU 188.341/MoU.05-Huk/2021 tentang Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten tentang Perubahan Perioritas dan Plafon Sementara Anggaran Tahun Anggaran 2021;
54. Nomor MoU 188.341/MoU.06-Huk/2021 tentang Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten tentang Perubahan kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2022;
55. Nomor MoU 188.341/MoU.07-Huk/2021 tentang Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 2022;
56. Nomor MoU 188.341/MoU.08-Huk/2021 tentang Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten tentang Penganggaran Pekerjaan Pembangunan RSUD Banten 9(Gedung 8 Lantai;
57. Nomor MoU 188.341/MoU.09-Huk/2021 tentang Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten tentang Perpanjangan Nota Kesepakatan Pelaksanaan Kegiatan tahun jamak Pekerjaan Pembangunan Stadion Utama Sport Center Provinsi Banten;
58. Nomor MoU 188.341/MoU.10-Huk/2021 tentang Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten tentang Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD Tahun Anggaran 2022;
59. Nomor MoU 188.341/MoU.11-Huk/2021 tentang Kesepakatan antara Kejaksaan Tinggi Banten dan Pemerintah Provinsi Banten tentang Pelaksanaan Pengawasan;
60. Nomor MoU 188.341/MoU.11-Huk/2021 tentang Kesepakatan antara Kejaksaan Tinggi Banten dan Pemerintah Provinsi Banten tentang Pelaksanaan tugas dan Fungsi;
61. Nomor MoU 65/KTR/Wil-XIII/1121 tentang Nota Kesepakatan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kedeputian

<p>Wilayah Banten, Kalimantan Barat dan Lampung dengan Pemerintah Provinsi Banten tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>62. Nomor MoU 700/NK.06-Huk/2022 tentang Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Perwakilan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Banten;</p> <p>63. Nomor MoU 180/NK.07-Huk/2022 tentang Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Kejaksaan Tinggi Banten</p> <p>64. Nomor Perjanjian 973/523-Bapenda/2022 tentang Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dan Kejaksaan Tinggi Banten;</p> <p>65. Nomor Perjanjian 181/016-BPKAD/2022 tentang Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten dan Kejaksaan Tinggi Banten;</p> <p>66. Nomor Perjanjian 460/280-Dinsos/III/2022 tentang Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Sosial Provinsi Banten dengan Balai Pemasyarakatan Klas II Serang;</p> <p>67. Nomor MoU PKS.8/PPU/PPPMU/PKL.3/2/2022, 800/0169-DLHK/III/2022, 660/310-DLH2022 tentang Nota Kesepakatan Antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan;</p> <p>68. Nomor MoU PRJ-11/WPS.08/2022 973/PKS.04-Huk/2022 tentang Kerjasama antara Kantor Wilayah DJB Banten dan Provinsi Banten;</p> <p>69. Nomor MoU NK/19/XI/Huk.8.1.1/2022 360.NK.12-Huk/2022 tentang Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Kepolisian Daerah Provinsi Banten;</p> <p>70. Nomor MoU 074/NK.05-Huk/II/2022 tentang Nota Kesepakatan Antara Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasunddin Banten;</p> <p>71. Nomor Perjanjian 074/PKS.01-Huk/II/2022 tentang Perjanjian Kerjasama Antara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Biro Hukum Sekertariat Daerah Provinsi Banten;</p>

72. Nomor MoU 18/D?HK.02.06/2021, 421.5/MoU.01-Huk/2022 tentang Nota Kesepakatan Antara Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemerintah Provinsi Banten;
73. Nomor Perjanjian 518/552/KUKM/2022 tentang Perjanjian Kerjasama Antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan Dinas Koperasi dan UKM;
74. Nomor MoU 640/MoU.23-Huk/2022 tentang Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Banten Pemerintah Kota Serang Dan Pemerintah Kabupaten Serang;
75. Nomor Perjanjian 869/52/MoU/DLH-KEB/I/2022 tentang Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten;
76. Nomor Perjanjian 523/714-DKP.02/2022 tentang Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Banten Dengan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
77. Nomor MoU 067/KB.13-Huk/2022 tentang Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Banten Dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
78. Nomor MoU 418.4/6023-Tapem/2022 102/067-Bapenda/2022 tentang Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Banten Dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Tabel 2.10
Capaian Indikator TPB/SDGs Sekretariat Daerah
Provinsi Banten

No	Indikator	Capaian		Penanggung Jawab
		2020	2021	
1	Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Nilai LKIP B menjadi 100%	65%	65%	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
2	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang mendapat layanan komprehensif	100%	100%	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3	Proporsi Perempuan dewasa dan anak perempuan mengalami kekerasan oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	PM	74,01%	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	PM	2,34%	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
<i>Sumber data: Laporan TPB/ SDGs Provinsi Banten Tahun 2020-2021</i>				

Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten

URAIAN	ANGGARAN (Rp)						REALISASI ANGGARAN (Rp)					RASIO ANGGARAN (%)						RATA-RATA PERTUMBUHAN		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Biro Pemerintahan	5.302.390.200	2.458.430.000	3.240.747.000	2.802.281.000			4.199.323.744	2.418.300.998	2.975.756.879	1.826.019.250			79,20	98,37	91,82	65,16			3.450.962.050	2.854.850.218
Biro Kesejahteraan Rakyat	20.179.312.500	5.548.750.000	16.777.266.000	7.359.110.749			20.071.189.250	5.386.590.185	16.097.364.337	2.903.225.300			99,46	97,08	95,95	39,45			12.466.109.812	11.114.592.268
Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat					20.160.770.750	32.746.337.500					17.321.658.006	19.679.616.913					85,92	60,10	26.453.554.125	18.500.637.460
Biro Hukum	6.097.245.500	3.909.260.000	3.065.585.000	2.370.376.000	3.204.118.000	3.982.978.000	4.741.801.200	3.004.496.025	2.317.415.485	1.197.314.646	2.230.167.164	2.864.677.361	77,77	76,86	75,59	50,51	69,60	71,92	3.771.593.750	2.725.978.647
Biro Organisasi dan RB	5.197.374.369	2.350.500.000	2.511.480.000	1.492.506.800	2.752.362.000	2.923.970.000	4.266.186.840	2.142.552.185	2.189.165.584	1.258.396.921	2.065.376.795	2.214.284.636	82,08	91,15	87,17	84,31	75,04	75,73	2.871.365.528	2.355.993.827
Biro Administrasi Pembangunan	3.726.543.000	3.474.240.000	2.095.038.000	1.611.562.834			3.300.799.550	3.040.408.460	2.037.594.213	1.355.010.674			88,58	87,51	97,26	84,08			2.726.845.959	2.433.453.224
Biro Bina Perekonomi	10.787.440.000	8.771.600.000	8.221.490.000	4.370.358.000			9.172.896.001	7.992.519.300	7.154.976.441	4.080.949.019			85,03	91,12	87,03	93,38			8.037.722.000	7.100.335.190
Biro Perekonomi dan Administrasi Pembangunan					4.370.358.000	3.817.950.000					4.080.949.019	3.557.037.792					93,38	93,17	4.094.154.000	3.818.993.406
Biro Umum	232.335.153.295	158.620.707.924	72.031.480.000	133.640.263.519	191.918.631.370	218.446.667.100	157.677.628.231	133.199.983.255	65.007.785.417	91.780.864.444	167.389.052.812	197.968.798.573	67,87	83,97	90,25	68,68	87,22	90,63	167.832.150.535	135.504.018.789
Biro Bina Infrastruktur	2.189.999.000	2.144.650.000	2.095.038.000	1.611.562.834			1.983.656.631	2.021.723.464	2.037.594.213	1.358.010.674			90,58	94,27	97,26	84,27			2.010.312.459	1.850.246.246
Biro Bina Barang dan Jasa					4.192.772.000	4.075.635.850					3.615.415.220	3.643.078.904					86,23	89,39	4.134.203.925	3.629.247.062
Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan	42.356.419.550	39.066.270.000	43.851.512.000	31.972.610.434			30.632.554.283	34.674.683.252	37.727.338.414	28.894.497.149			72,32	88,76	86,03	90,37			39.311.702.996	32.982.268.275
Biro Administrasi Pimpinan					15.640.563.000	15.094.408.600					12.936.537.577	14.535.403.619					82,71	96,30	15.367.485.800	13.735.970.598

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang ada pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten, maka dapat dikategorikan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyusunan strategi dalam perencanaan perangkat daerah. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari faktor eksternal maupun faktor internal. Kemudian dapat ditentukan strategi yang tepat dengan menggunakan metode analisis SWOT, yaitu dengan mempertimbangkan *Strength, Weakness, Opportunities, Threats*.

Faktor internal terdiri dari *strength* (kekuatan) dan *Weakness* (kelemahan). Faktor ini merupakan yang berasal dari internal perangkat daerah. Adapun faktor eksternal terdiri dari *Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman). Faktor ini merupakan yang berasal dari eksternal perangkat daerah. Berikut ini hasil analisis SWOT Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Tabel 2.12
Analisis IFAS (*internal factor analysis strategy*) dan Analisis EFAS (*eksternal factor analysis strategy*)

Faktor Strategis Internal	Bobot	Rating	Skor	Keterangan
Kekuatan				
1. Kewenangan koordinasi perumusan bahan kebijakan Pemerintahan, Otonomi daerah serta kebijakan Kesejahteraan Rakyat	0,1	5	0,5	Biro Pemkesra
2. Kewenangan perumusan Kebijakan dan Telaahan Produk Hukum Daerah	0,1	5	0,5	Biro Hukum
3. Kewenangan koordinasi perumusan bahan kebijakan perekonomian dan administrasi pembangunan	0,1	5	0,5	Biro Ekbang
4. Penyelenggaraan terpadu pengadaan barang/jasa secara elektronik	0,02	2,5	0,05	Biro PBJ
5. Kewenangan koordinasi perumusan kebijakan penataan organisasi	0,1	5	0,5	Biro Organisasi RB
6. Ketersediaan Sumber Daya yang sangat cukup	0,03	3	0,09	Biro Umum
7. Kecepatan akses informasi Pimpinan Daerah	0,05	4	0,2	Biro Adpim
Kelemahan				
1. Belum optimalnya kebijakan Pemerintahan, Otonomi daerah serta kebijakan Kesejahteraan Rakyat	0,1	-1	-0,1	Biro Pemkesra
2. Belum optimalnya evaluasi sinergitas produk hukum daerah	0,1	-1	-0,1	Biro Hukum

3. Belum optimalnya kebijakan perekonomian dan administrasi pembangunan	0,1	-1	-0,1	Biro Ekbang
4. Belum optimalnya layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik	0,02	-2	-0,04	Biro PBJ
5. Belum optimalnya implementasi kebijakan penataan organisasi	0,1	-1	-0,1	Biro Organisasi RB
6. Belum Optimalnya Pengelolaan Pendistribusian Sarana dan Prasarana serta sumber daya aparatur di lingkungan Setda	0,03	-1,5	-0,045	Biro Umum
7. Belum optimalnya koordinasi dukungan Fasilitasi Layanan Pimpinan Daerah	0,05	-1,75	-0,087	Biro Adpim
	1,00		1,768	

Faktor Strategis Eksternal	Bobot	Rating	Skor	Keterangan
Peluang				
1. Peran aktif akademisi dan Lembaga terkait dalam menyusun perumusan kebijakan Pemerintahan, Otonomi daerah serta kebijakan Kesejahteraan Rakyat	0,1	4	0,4	Biro Pemkesra
2. Sinergitas peraturan perundang-undangan pemerintah pusat dengan produk hukum daerah	0,1	4	0,4	Biro Hukum
3. Peran aktif akademisi dan Lembaga terkait dalam menyusun perumusan kebijakan perekonomian dan administrasi pembangunan	0,1	4	0,4	Biro Ekbang
4. Berkembangnya kebijakan pengadaan barang/jasa secara elektronik	0,02	2,5	0,05	Biro PBJ
5. Semakin dinamisnya peraturan perundangan dari Pusat yang terkait penataan organisasi	0,1	4	0,4	Biro Organisasi RB
6. Semakin meningkatnya kepuasaan pelayanan sarana dan prasarana di lingkungan setda	0,03	3	0,09	Biro Umum
7. Semakin meningkatnya sarana dan prasarana komunikasi melalui media sosial.	0,05	3,5	0,175	Biro Adpim
Ancaman				
1. Rendahnya penyempurnaan kebijakan terhadap fenomena kekinian berdampak terhadap instabilitas teknis pelaksanaannya, khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan, otoda dan kesra,	0,1	-1	-0,1	Biro Pemkesra
2. Kebijakan daerah tumpang tindih dengan kebijakan lainnya	0,1	-1	-0,1	Biro Hukum
3. Fenomena permasalahan kebijakan perekonomian yang semakin kompleks	0,1	-1	-0,1	Biro Ekbang
4. Semakin meningkatnya tuntutan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik	0,02	-2	-0,04	Biro PBJ
5. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan public	0,1	-1	-0,1	Biro Organisasi RB
6. Tuntutan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor yang memadai	0,03	-1,5	-0,045	Biro Umum
7. Meningkatnya sifat kristis masyarakat memerlukan efektivitas penyediaan, pelayanan dan pengelolaan informasi pimpinan.	0,05	-1,75	-0,087	Biro Adpim
	1		1,343	

Setelah mengetahui analisis IFAS dan EFAS selanjutnya kedua analisis faktor tersebut dirangkum menjadi analisis *strategy factor analysis summary* (SFAS). Analisis IFAS dan EFAS (1,768 ; 1,343) sehingga berada pada kuadran I yaitu memanfaatkan kekuatan (*strength*) dengan dukungan mengoptimalkan peluang (*opportunities*).

Tabel 2.13
Analisis EFAS dan IFAS

IFAS EFAS	Strength	Weakness
Opportunities	Strategi SO Mengoptimalkan kewenangan perumusan Kebijakan dan Telaahan Produk Hukum Daerah dengan melakukan Sinergitas peraturan perundang-undangan pemerintah pusat dengan produk hukum daerah	Strategi WO Meningkatkan Sinergitas peraturan perundang-undangan pemerintah pusat dengan produk hukum daerah untuk mengoptimalkan evaluasi sinergitas produk hukum daerah
Threats	Strategi ST Mengoptimalkan kewenangan perumusan Kebijakan dan Telaahan Produk Hukum Daerah dengan meminimalisir tumpang tindih antar kebijakan	Strategi WT Mengoptimalkan evaluasi sinergitas produk hukum daerah untuk meminimalisir tumpang tindih kebijakan

Berdasarkan analisis IFAS dan EFAS diatas, maka strategi yang tepat untuk Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut

1. Mengoptimalkan kewenangan perumusan Kebijakan dan Telaahan Produk Hukum Daerah dengan melakukan Sinergitas peraturan perundang-undangan pemerintah pusat dengan produk hukum daerah
2. Mengoptimalkan kewenangan koordinasi perumusan bahan kebijakan Pemerintahan, Otonomi daerah serta kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan memanfaatkan peran aktif akademisi dan Lembaga terkait dalam menyusun perumusan kebijakan Pemerintahan, Otonomi daerah serta kebijakan Kesejahteraan Rakyat
3. Mengoptimalkan kewenangan koordinasi perumusan

bahan kebijakan perekonomian dan administrasi pembangunan dengan memanfaatkan peran aktif akademisi dan Lembaga terkait dalam menyusun perumusan kebijakan perekonomian dan administrasi pembangunan

4. Mengoptimalkan Penyelenggaraan terpadu pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan memperhatikan perkembangnya kebijakan pengadaan barang/jasa secara elektronik
5. Mengoptimalkan kewenangan koordinasi perumusan kebijakan penataan organisasi dengan memperhatikan dinamisnya peraturan perundangan dari Pusat yang terkait penataan organisasi
6. Mengoptimalkan ketersediaan Sumber Daya yang sangat cukup untuk meningkatkan kepuasaan pelayanan sarana dan prasarana di lingkungan setda
7. Mengoptimalkan kecepatan akses informasi Pimpinan Daerah dengan memperhatikan kondisi saat ini yaitu meningkatnya sarana dan prasarana komunikasi melalui media sosial.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai unsur pembantu pimpinan Pemerintah Provinsi Banten yang Dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Sekretariat Daerah Provinsi Banten bertugas membantu Gubernur Banten dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan administrasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Sekretariat Daerah Provinsi Banten dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya telah diupayakan secara optimal. Namun demikian upaya-upaya tersebut masih menyisakan persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan tujuan, yaitu keselarasan dengan Renstra dengan RPD Provinsi Banten 2023 – 2026 dan munculnya berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang berada pada lingkup tugas pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengkoordinasian tugas perangkat daerah, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Setda Provinsi Banten

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1.	Belum Optimalnya Kualitas Kebijakan	Belum Optimalnya Koordinasi Perumusan	a. Masih Kurangnya Implementasi Rumusan Kebijakan Pemerintahan Dan

	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kebijakan di Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Produk Hukum Daerah	Otonomi Daerah Serta Kesejahteraan Rakyat
			b. Masih Belum Optimalnya Dukungan Kebijakan Daerah Terkait Penyaluran Hibah Dan Bantuan Sosial
			c. Implementasi Rumusan Kebijakan Biro Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Masih Kurang, Itu Terbukti Dengan Kurangnya Output Kebijakan Yang Dikeluarkan Oleh Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
			d. Masih Terdapat Ketidakjelasan Dan Optimalnya Implementasi Pembagian Urusan Pemerintahan
			e. Keberadaan Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) Belum Optimal Dalam

		Perencanaan Dan Dampak Bagi Pembangunan Di Banten
	f.	<p>Masih Ditemukan Pilar Batas Daerah Yang Tidak Berfungsi Dengan Optimal Karena Rusak/Hilang Akibat Bencana Alam, Aktivitas Pembangunan (Misal Pelebaran Jalan), Dan Lain Sebagainya.</p> <p>Keberadaan Pilar Batas Yang Berfungsi Secara Optimal Penting Sebagai Penanda Batas Daerah Di Lapangan</p>
	g.	<p>Fasilitasi Kerjasama Masih Belum Optimal Dengan Masih Banyaknya OPD Melaksanakan Kerjasama Dengan Pihak Luar Tidak Melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah</p>

		<p>h. Masih Kurangnya Data Pendukung Dalam Mengambil Kebijakan Terkait Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kesejahteraan Rakyat</p>
		<p>i. Belum Optimalnya Ketercapaian Kualitas Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota</p>
		<p>j. Belum Optimalnya Ketercapaian Kualitas Produk Hukum Provinsi Dan Keselarasan Peraturan Perundangan Daerah dengan Regulasi Hukum Nasional</p>
		<p>k. Belum Optimalnya Fasilitasi Bantuan Hukum dan HAM</p>
		<p>l. Belum Optimalnya Ketercapaian Kualitas Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota</p>

	Belum Optimalnya Koordinasi Perumusan Kebijakan di Bidang Perekonomian, Adminsitrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa	<p>a. Belum Optimalnya Kualitas Kebijakan Perekonomian Daerah</p> <p>b. Belum Optimalnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan</p> <p>c. Masih Rendahnya Dukungan Anggaran dalam Perumusan Kebijakan Perekonomain Daerah</p> <p>d. Belum Optimalnya Koordinasi Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Pembangunan</p> <p>e. Belum Optimalnya Dukungan Perangkat Daerah dalam Pengenalian Administrasi Pembangunan</p> <p>f. Belum Optimalnya Implementasi Pelaksanaan Peraturan terkait Pengadaan</p>
--	---	--

			Barang/Jasa Pemerintah Dalam Proses Pemilihan Barang/Jasa
			g. Masih Terdapat Kendala Persyaratan Peserta pada Pelaksanaan Tender dan Seleksi
			h. Belum Optimalnya Kualitas Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa
			i. Belum Optimalnya Pelaksanaan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa
	Belum Optimalnya Koordinasi Perumusan Kebijakan di Bidang Administrasi Umum		a. Belum Optimalnya Pelayanan dan Fasilitasi Pimpinan
			b. Belum Optimalnya Kualitas Perencanaan dan Kepegawaian Setda
			c. Belum Optimalnya Pelayanan Komunikasi Pimpinan
			d. Belum Optimalnya Pelayanan Keprotokolan

		Pimpinan
	e.	Belum Optimalnya Pelayanan Setda
	f.	Belum Optimalnya Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan
	g.	Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan dan Aset setda
	h.	Belum Optimalnya Fasilitasi Rumah Tangga Pimpinan
	i.	Belum Optimalnya Implementasi Penataan Organisasi
	j.	Belum Optimalnya Efektifitas Kelembagaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
	k.	Belum Optimal Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Organisasi
	l.	Belum Optimalnya Kualitas Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi serta Masih Rendahnya

			Implementasi Budaya Kerja
--	--	--	------------------------------

Sumber Data : Data Olahan Sekretariat Daerah Tahun 2022

3.2. Telaahan Visi dan Misi RPJPD Provinsi Banten.

Sekretariat Daerah Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu memperhatikan visi dan misi Pemerintah Provinsi Banten yang tercantum dalam RPJPD Provinsi Banten 2005–2025. Hal ini dilakukan agar penyusunan rumusan kegiatan dalam rencana program strategis tersebut sesuai dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Visi Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

***"BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN
IMAN DAN TAQWA"***

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, maka ditetapkan Misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Banten dalam mendukung keberhasilan Visi adalah :

- 1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas***
- 2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan***
- 3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari***
- 4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa***

Tujuan dan sasaran misi 4. ***Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa*** adalah sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran
--------	---------

Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur dan kelembagaan IPTEK - Meningkatnya kualitas data, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan public	Meningkatnya kualitas dan daya saing pelayanan dasar masyarakat
3. Meningkatkan kapasitas keuangan dan pembiayaan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya pendapatan daerah - Meningkatnya efektivitas alokasi belanja daerah - Meningkatnya tertib administasi pengelolaan keuangan daerah - Meningkatnya partisipasi pembiayaan pembangunan daerah dari masyarakat dan swasta
4. Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya pelayanan umum dan kemasyarakatan
5. Meningkatkan ketataan hukum masyarakat	Meningkatnya kesadaran, kepatuhan dan supremasi hukum
6. Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi	Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi masyarakat
7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Menurunnya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban umum

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Berdasarkan target capaian program Pemerintah Pusat yang

perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah serta relevan dengan Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah adalah Program Reformasi Birokrasi dengan sasaran programnya adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Sumber Daya Aparatur
2. Peningkatan kualitas kebijakan daerah
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Penyederhanaan Birokrasi
5. Transformasi kebijakan ekonomi
6. Peningkatan kualitas pelayanan pengadaan barang/jasa
7. Peningkatan kualitas budaya kerja
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik
9. Peningkatan kualitas pencapaian Standar Pelayanan Minimal

3.4. Penentuan Isu Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Perumusan isu strategis dilakukan melalui evaluasi kondisi dilingkungan internal maupun eksternal dianggap dapat mempengaruhi pencapaian tujuan pelayanan Sekretariat Daerah. Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana kerja daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan keperluan penentuan prioritas kinerja pelayanan Sekretariat Daerah sehingga dapat dioperasionalkan secara moral serta etika birokrasi dapat di pertanggungjawabkan.

Isu strategis ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam hal kinerja pelayanan Setda karena dampaknya akan signifikan bagi Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang akan datang.

Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah:

1. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat daerah menuju clean and good

- governance;
2. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah;
 3. Belum selarasnya peraturan perundangan daerah dengan regulasi hukum nasional, belum optimalnya pelayanan bantuan hukum dan HAM;
 4. Masih kurangnya implementasi kebijakan perekonomian daerah;
 5. Masih rendahnya implelementasi dan pengendalian kebijakan Sarana Perekonomian, Industri Jasa dan Ketenagakerjaan, serta produksi daerah;
 6. Belum maksimalnya kinerja layanan Administrasi Pembangunan;
 7. Belum optimalnya pengelolaan dan pelayanan pengelolaan pengadaan barang/jasa dilingkungan Permerintah Provinsi Banten;
 8. Belum optimalnya kualitas perencanaan dan kepegawaian Sekretarait Daerah;
 9. Belum optimalnya kualita keprotokolan pimpinan;
 10. Belum optimalnya kualitas materi dan komunikasi pimpinan;
 11. Masih kurangnya kualitas pelayanan di sekretariat daerah;
 12. Masih kurangnya Prasarana dan sarana penunjang kinerja di Lingkungan Setda;
 13. Belum optimalnya efektifitas kelembagaan;
 14. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik;
 15. Belum optimal akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan, agar diketahui apa yang harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan berdasarkan rumusan RPD Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026.

Salah satu yang menopang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah berfungsi sangat strategis dalam melaksanakan pelayanan informasi, administrasi dan bahkan berbagai aspek fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Dengan demikian peranan dan fungsi serta kinerja Sekretaris Daerah begitu penting dan sangat strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan Daerah. Tujuan, dan Sasaran yang erat kaitannya dengan tugas Sekretariat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Bab ini memuat tujuan dan sasaran RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran

pokok RPJPD Provinsi Banten, dan isu-isu strategis yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya.

Tujuan daerah pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 adalah :

“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa”

Adapun tujuan pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 adalah:

“Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah” dan “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”

4.2. Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dalam mencapai tujuan perangkat daerah pada Tahun 2023-2026, Sekretariat Daerah Provinsi Banten menjabarkannya kedalam sasaran daerah sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel. 4.1
SANDINGAN TUJUAN DAN SASARAN DAERAH DENGAN TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

Tujuan DAERAH/ SETDA	Sasaran DAERAH/ SETDA	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		TARGET			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Meningkatnya Penyelenggaran Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	61	65	66	71	76	81
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	62,60	PM	70	73	77	80
Perangkat Daerah Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas kelembagaan yang terukur	Indeks Kelembagaan	Nilai	N/A	N/A	41	50	55	60
	Meningkatnya Kepatuhan Pelayanan Publik	Indeks kepatuhan pelayanan publik	Nilai	73,95	80,55	81,81	82,87	83,94	85
	Meningkatnya kualitas informasi kinerja Perangkat Daerah	Nilai komponen pelaporan SAKIP Provinsi	Nilai	9,87	9,95	10,77	11,17	11,6	12
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	N/A	N/A	60	71	76	81
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik dan bebas KKN	Indeks Tata Kelola Pengadaan barang dan jasa	Persen	47,7 8	75,05	80,8	86,55	92,95	100
	Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Persentasi rumusan administrasi pembangunan yang diimplementasikan	Persen	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian daerah	Persentasi rumusan kebijakan bidang perekonomian daerah yang diimplementasikan	Persen	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Kerjasama dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	4,21	4,23	4,24	4,29	4,34	4,39
	Meningkatkan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentasi rumusan kebijakan kesejahteraan yang diimplementasikan	Persen	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pimpinan Daerah	Persentasi realisasi pelayanan pimpinan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Setda	Persentasi realisasi pelayanan SETDA	Persen	100	100	100	100	100	100

Sumber Data : RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026. Startegi dan Arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi perangkat daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi perangkat daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Strategi dan Arah Kebijakan yang erat kaitannya dengan tugas Sekretariat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sebagai berikut:

TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2023 – 2026

Visi: Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa Misi 4: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa			
TUJUAN DAERAH/ TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	STRATEGI DAERAH/STRATEGI PERANGKAT DAERAH	ARAH KEBIJAKAN DAERAH/ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Meningkatnya Penyelenggaran Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Pelayanan Publik	a. Peningkatan kualitas kajian dan implementasi kebijakan serta inovasi pelayanan public berdasarkan prinsip organisasi perangkat kerja daerah hemat struktur kaya fungsi
		Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	a. Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa
		Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Dan Evaluasi Serta Pencapaian Kinerja Pemerintah	a. Peningkatan Kualitas Informasi Kinerja Perangkat Daerah; b. Peningkatan Kualitas Hubungan Lintas Fungsi Yang Mendukung
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	a. Meningkatkan Perencanaan, Pengukuran Kinerja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kerjasama dan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan	Meningkatkan Kerjasama Daerah dan Optimalisasi Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan	a. Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Kewilayahan yang di Implementasikan b. Peningkatan Kualitas Kebejikan Otonomi Daerah yang di Implementasikan c. Peningkatan Kerjasama Daerah
	Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatkan Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	a. Peningkatan fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual b. Peningkatan Kualitas Kebijakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar c. Peningkatan Kualitas Kebijakan Urusan

Visi: Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa			
Misi 4: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa			
TUJUAN DAERAH/ TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	STRATEGI DAERAH/STRATEGI PERANGKAT DAERAH	ARAHKEBIJAKAN DAERAH/ARAHKEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah	Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah	Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang Baik dan Bebas KKN	Meningkatkan Fasilitasi Penyelenggaraan Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Bersih Dan Bebas KKN	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Pengelolaan Informasi Hukum dan Domunetasi Produk Hukum b. Peningkatan Fasilitasi Bantuan Hukum dan HAM c. Peningkaan Kualitas Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota d. Peningkatan Kualitas Produk Hukum Provinsi dan Keselarasan Peraturan Perundangan Daerah dengan Regulasi Hukum Nasional
	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pembangunan Daerah	Meningkatkan Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kualitas Pemanfaatan Sistem Pengadaan b. Peningkatan Kualitas Kematangan UKPBJ c. Peningkatan Kualitas Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian Daerah	Meningkatkan Kualitas Kebijakan Perekonomian Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan b. Peningkatan Ketersediaan Dokumen Hasil Rekomendasi Pengendalian Administrasi Pembangunan
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kelembagaan yang terukur	Meningkatkan Kualitas Evaluasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kualitas Sarana Perekonomian b. Peningkatan Kualitas Kebijakan Industri Jasa dan Ketenagakerjaan c. Peningkatan Kualitas Kebijakan Produksi Daerah
	Meningkatnya Kepatuhan Pelayanan Publik	Meningkatkan Pembinaan dan Evaluasi Kepatuhan Pelayanan Publik pada	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan
			<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik

Visi: Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa			
Misi 4: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa			
TUJUAN DAERAH/ TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	STRATEGI DAERAH/STRATEGI PERANGKAT DAERAH	ARAHKEBIJAKAN DAERAH/ARAHKEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH
		Perangkat Daerah	
	Meningkatnya Kualitas Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kualitas Pelaporan Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja b. Peningkatan Kualitas Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
	Meningkatnya Kualitas Layanan Pimpinan Daerah	Meningkatkan Kualitas Layanan Pimpinan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan c. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Kepegawaian Daerah
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan SETDA	Meningkatkan Fasilitasi Pelayanan Setda	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan b. Peningkatan Tata Kelola Keuangan dan Aset Setda c. Peningkatan Layanan Rumah Tangga Pimpinan dan Setda

Arah kebijakan tahunan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan penataan kelembagaan serta meningkatkan kualitas Anjab ABK 2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa 3. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Kepegawaian Setda 4. Meningkatkan Fasilitasi layanan sarana dan prasarana Setda 5. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Industri Jasa dan Ketenagakerjaan 6. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar 7. Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Provinsi dan Keselarasan Peraturan Perundungan Daerah dengan Regulasi Hukum Nasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Pelaporan Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja 2. Optimalisasi Kualitas Kematangan UKPBJ 3. Meningkatkan kualitas fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan 4. Meningkatkan kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Setda 5. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Perekonomian 6. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Administrasi Kewilayahan yang di Implementasikan 7. Meningkatkan Pengelolaan Informasi Hukum dan Domunetasi Produk Hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik 2. Meningkatkan Kualitas Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ 3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keprotokolan 4. Meningkatkan kualitas Layanan Rumah Tangga Pimpinan dan Setda 5. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Produksi Daerah 6. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Otonomi Daerah yang di Implementasikan 7. Meningkatkan kualitas Fasilitasi Bantuan Hukum dan HAM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 2. Meningkatkan Kualitas Pemanfaatan Sistem Pengadaan 3. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Kepegawaian Setda 4. Meningkatkan Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan 5. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan 6. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Administrasi Kewilayahanyang di Implementasikan 7. Meningkatkan kualitas sinergitas kebijakan daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencaapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Indikator kinerja program (*outcome/hasil*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

Indikator kinerja kegiatan (*output/keluaran*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.

Data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) pada untuk setiap indikator kinerja merupakan data capaian awal tahun perencanaan dan menjadi titik tolak perumusan target kinerja pada periode perencanaan.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sebagaimana Tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
PROVINSI BANTEN PERIODE 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah				Indeks Reformasi Birokrasi		66 Nilai		71 Nilai		76 Nilai		81 Nilai		81 Nilai			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan				Capaian SAKIP Perangkat Daerah		60 Nilai		65 Nilai		70 Nilai		80 Nilai		80 Nilai			
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Percentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	2.696.358.000,00	100 %	2.831.176.000,00	100 %	2.972.735.000,00	100 %	3.121.371.000,00	100 %	3.121.371.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	BANTEN	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	170.000.000,00	100 %	170.000.000,00	100 %	170.000.000,00	100 %	170.000.000,00	100 %	170.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	BANTEN	
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	45.000.000,00	100 %	45.000.000,00	100 %	45.000.000,00	100 %	45.000.000,00	100 %	45.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	BANTEN	
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	255.000.000,00	100 %	255.000.000,00	100 %	255.000.000,00	100 %	355.000.000,00	100 %	355.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	BANTEN	
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	100 %	100 %	626.358.000,00	100 %	761.176.000,00	100 %	902.735.000,00	100 %	951.371.000,00	100 %	951.371.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	BANTEN	
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	1.600.000.000,00	100 %	1.600.000.000,00	100 %	1.600.000.000,00	100 %	1.600.000.000,00	100 %	1.600.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	BANTEN	

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			Indeks Reformasi Birokrasi		66 Nilai		71 Nilai		76 Nilai		81 Nilai		81 Nilai				
Meningkatnya Kerjasama dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan			Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		N/A Nilai		4.24 Nilai		4.29 Nilai		4.34 Nilai		4.39 Nilai		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	BANTEN	
			4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Percentase Realisasi Kebijakan Administrasi Kewilayahan	100 %	100 %	400.000.000,00	100 %	400.000.000,00	100 %	250.000.000,00	100 %	393.902.985,00	100 %	393.902.985,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	BANTEN
			4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Ketercapaian Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	100%	100%	400.000.000,00	100%	400.000.000,00	100%	250.000.000,00	100%	393.902.985,00	100%	393.902.985,00	BANTEN	BANTEN
			4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Percentase realisasi kebijakan Otonomi Daerah	100 %	100 %	700.000.000,00	100 %	618.887.163,00	100 %	412.140.000,00	100 %	633.837.015,00	100 %	633.837.015,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	BANTEN
			4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah	Percentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	100%	100%	700.000.000,00	100%	618.887.163,00	100%	412.140.000,00	100%	633.837.015,00	100%	633.837.015,00	BANTEN	BANTEN
			4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Percentase realisasi kebijakan kerjasama pemerintahan	100 %	100 %	608.108.000,00	100 %	582.478.837,00	100 %	400.000.000,00	100 %	600.000.000,00	100 %	600.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	BANTEN
			4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Percentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	100%	100%	608.108.000,00	100%	582.478.837,00	100%	400.000.000,00	100%	600.000.000,00	100%	600.000.000,00	BANTEN	BANTEN
			Meningkatnya Kebijakan Kesetaraan Rakyat	Percentase realisasi kebijakan kesetaraan rakyat yang diimplementasikan		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	BANTEN
			4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan realisasi Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	100 %	100 %	21.686.480.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	BANTEN								
			4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Percentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual	100%	100%	21.686.480.000,00	100%	21.686.480.000,00	100%	21.686.480.000,00	100%	21.686.480.000,00	100%	21.686.480.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	BANTEN
Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat			4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Percentase Rumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	100 %	100 %	450.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	BANTEN								
			4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Ketercapaian Jumlah Dokumen kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	100%	100%	450.000.000,00	100%	450.000.000,00	100%	450.000.000,00	100%	450.000.000,00	100%	450.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	BANTEN
			4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Percentase Rumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	100 %	100 %	500.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	BANTEN								
			4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Ketercapaian Jumlah Dokumen kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	100%	100%	500.000.000,00	100%	500.000.000,00	100%	500.000.000,00	100%	500.000.000,00	100%	500.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	BANTEN
			JUMLAH				27.040.946.000,00		27.069.022.000,00		26.671.355.000,00		27.385.591.000,00		27.385.591.000,00		

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN BIRO HUKUM PROVINSI BANTEN PERIODE 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
								Tahun 2023				Tahun 2024				Tahun 2025							
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi			Nilai	66 Nilai		71 Nilai		76 Nilai		81 Nilai		81 Nilai								
			Capaian SAKIP Perangkat Daerah			Nilai	60 Nilai		65 Nilai		70 Nilai		80 Nilai		80 Nilai								
			4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Percentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	100%	415.915.000	100%	436.711.000	100%	458.546.000	100%	481.473.000	100%	481.473.000	Biro Hukum	Kota Serang					
			4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah	100%	100%	28.100.000	100%	28.175.000	100%	28.175.000	100%	28.175.000	100%	28.175.000	Biro Hukum	Kota Serang					
			4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	4.000.000	100%	4.000.000	100%	4.000.000	100%	4.000.000	100%	4.000.000	Biro Hukum	Kota Serang					
			4.01.01.1.05	Administrasi Kepewajiman Perangkat Daerah	Percentase Ketercapaian Kegiatan Kepewajiman Perangkat Daerah	100%	100%	59.500.000	100%	59.500.000	100%	81.250.000	100%	59.500.000	100%	59.500.000	Biro Hukum	Kota Serang					
			4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	223.588.457	100%	233.500.000	100%	233.500.000	100%	277.977.000	100%	277.977.000	Biro Hukum	Kota Serang					
			4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100.726.543	100%	111.536.000	100%	111.621.000	100%	111.821.000	100%	111.821.000	Biro Hukum	Kota Serang					

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN BIRO HUKUM
PROVINSI BANTEN PERIODE 2023-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
								Tahun 2023				Tahun 2024				Tahun 2025					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah																				
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan Daerah		4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Percentase Dokumentasi Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	100 %	100 %	300.000.000,00	100 %	297.012.000,00	100 %	263.836.000,00	100 %	300.000.000,00	100 %	300.000.000,00	100 %	Biro Hukum	Kota Serang	
									500.000.000,00	100 %	500.000.000,00	100 %	450.000.000,00	100 %	500.000.000,00	100 %	500.000.000,00	100 %	Biro Hukum	Kota Serang	
									955.000.000,00	100 %	950.000.000,00	100 %	950.000.000,00	100 %	951.080.000,00	100 %	951.080.000,00	100 %	Biro Hukum	Kota Serang	
									1.508.477.000,00	100 %	1.500.000.000,00	100 %	1.500.000.000,00	100 %	1.500.000.000,00	100 %	1.500.000.000,00	100 %	Biro Hukum	Kota Serang	
									1.755.000.000,00	100 %	1.747.012.000,00	100 %	1.663.836.000,00	100 %	1.751.080.000,00	100 %	1.751.080.000,00	100 %	Biro Hukum	Kota Serang	
									1.508.477.000,00	100 %	1.500.000.000,00	100 %	1.500.000.000,00	100 %	1.500.000.000,00	100 %	1.500.000.000,00	100 %	Biro Hukum	Kota Serang	
									3.679.392.000,00		3.683.723.000,00		3.622.382.000,00		3.732.553.000,00		3.732.553.000,00				
JUMLAH																					

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PROVINSI BANTEN PERIODE 2023-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi			
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026							
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah				Indeks Reformasi Birokrasi		66 Nilai		71 Nilai		76 Nilai		81 Nilai		81 Nilai					
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan				Capaian SAKIP Perangkat Daerah		60 Nilai		65 Nilai		70 Nilai		80 Nilai		80 Nilai					
					4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	2.365.665.749	100 %	2.385.154.950	100 %	2.365.665.749	100 %	2.365.665.749	100 %	2.365.665.749	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Kota Serang	
					4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 %	63.840.000	100 %	63.840.000	100 %	63.840.000	100 %	63.840.000	100 %	63.840.000	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Kota Serang
					4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah	5 Dokumen	100 %	18.860.000	100 %	18.860.000	100 %	18.860.000	100 %	18.860.000	100 %	18.860.000	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Kota Serang
					4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	6 Dokumen	100 %	619.411.749	100 %	638.900.950	100 %	619.411.749	100 %	619.411.749	100 %	619.411.749	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Kota Serang
					4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Laporan	24 Laporan	1.663.554.000	24 Laporan	1.663.554.000	24 Laporan	1.663.554.000	24 Laporan	1.663.554.000	24 Laporan	1.663.554.000	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Kota Serang
						Indeks Reformasi Birokrasi		66 Nilai		71 Nilai		76 Nilai		81 Nilai		81 Nilai				
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah																			
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian Daerah				4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian Yang di Implementasikan		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Dalam dan Luar Wilayah	
						Persentase Tersedianya Perumusan Kebijakan Sarana Perekonomian	100 %	100 %	1.191.070.251	100 %	1.187.878.050	100 %	976.527.251	100 %	1.316.131.251	100 %	1.316.131.251	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Dalam dan Luar Wilayah	
						Persentase Tersedianya Perumusan Kebijakan Industri Jasa dan Ketenagakerjaan	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %				
						Persentase Tersedianya Perumusan Kebijakan Produkdi Daerah	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %				
						4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Tersedianya Perumusan Kebijakan Industri Jasa dan Ketenagakerjaan	100 %	100 %	180.000.000	100 %	180.000.000	100 %	180.000.000	100 %	280.000.000	100 %	280.000.000	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

			4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Tersedanya Perumusan Kebijakan Produksi Daerah	100%	100%	411.070.251	100%	407.878.050	100%	291.756.562	100%	436.131.251	100%	436.131.251	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Dalam dan Luar Wilayah
			4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Tersedanya Perumusan Kebijakan Sarana Perekonomian	100%	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	504.770.689	100%	600.000.000	100%	600.000.000	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Dalam dan Luar Wilayah
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Pembangunan Daerah	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Tersedanya Perumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan	100 %	100 %	1.000.000.000	100 %	1.000.000.000	100 %	1.000.000.000	100 %	1.075.000.000	100 %	1.075.000.000	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Dalam dan Luar Wilayah
					Persentase Tersedanya Dokumen Hasil Rekomendasi Pengendalian Administrasi Pembangunan Sebagai Bahan Evaluasi	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
			4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersedanya hasil dokumentasi pengendalian Administrasi Pembangunan sebagai bahan evaluasi	100%	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Dalam dan Luar Wilayah
			4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersedanya perumusan kebijakan Administrasi Pembangunan	100%	100%	450.000.000	100%	450.000.000	100%	450.000.000	100%	525.000.000	100%	525.000.000	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Dalam dan Luar Wilayah
			JUMLAH					4.556.736.000		4.573.033.000		4.342.193.000		4.756.797.000		4.756.797.000		

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
PROVINSI BANTEN PERIODE 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						Tahun 2023				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
Terwujudnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada perangkat daerah				Indeks Reformasi Birokrasi		66 Nilai		71 Nilai		76 Nilai		81 Nilai		81 Nilai				
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan				Capaian SAKIP Perangkat Daerah		60 Nilai		65 Nilai		70 Nilai		80 Nilai		80 Nilai				
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Percentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Nilai	100 Nilai	2.858.045.715,00	100 Nilai	2.789.514.612,00	100 Nilai	2.544.483.455,00	100 Nilai	2.812.116.101,00	100 Nilai	2.812.116.101,00	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	KOTA SERANG		
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	100 %	59.850.000,00	100 %	59.850.000,00	100 %	59.850.000,00	100 %	75.000.000,00	100 %	75.000.000,00	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	KOTA SERANG		
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah	8 Dokumen %	100 %	10.500.000,00	100 %	10.500.000,00	100 %	10.500.000,00	100 %	20.000.000,00	100 %	20.000.000,00	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	KOTA SERANG		
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	1 Dokumen %	100 %	261.644.000,00	100 %	237.000.000,00	100 %	144.633.455,00	100 %	265.000.000,00	100 %	265.000.000,00	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	KOTA SERANG		
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	100 %	100 %	684.051.715,00	100 %	640.264.612,00	100 %	487.500.000,00	100 %	610.116.101,00	100 %	610.116.101,00	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	KOTA SERANG		
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	1.842.000.000,00	100 %	1.842.000.000,00	100 %	1.842.000.000,00	100 %	1.842.000.000,00	100 %	1.842.000.000,00	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	KOTA SERANG		

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
PROVINSI BANTEN PERIODE 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi					
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target		Rp					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				Indeks Reformasi Birokrasi		66 Nilai		71 Nilai		76 Nilai		81 Nilai		81 Nilai							
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik dan bebas KKN				Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa		80,80 Nilai		86,55 Nilai		92,85 Nilai		92,85 Nilai		100 Nilai		Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	KOTA SERANG				
						22,22 Nilai	26,67 Nilai	0,00	31,11 Nilai	0,00	35,56 Nilai	0,00	40 Nilai	0,00	40 Nilai	0,00	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	KOTA SERANG			
						Presentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	6 Dokumen %	100 %	520.000.000,00	100 %	550.000.000,00	100 %	550.000.000,00	100 %	610.000.000,00	100 %	2.230.000.000,00	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	KOTA SERANG		
						4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PEN GADAAAN BARANG DAN JASA	A. Pemanfaatan Sistem Pengadaan	30 %	30 %	950.000.000,00	30 %	980.000.000,00	30 %	980.000.000,00	30 %	1.040.000.000,00	30 %	1.040.000.000,00	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	KOTA SERANG
						4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Presentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	6 Dokumen %	100 %	950.000.000,00	100 %	980.000.000,00	100 %	980.000.000,00	100 %	1.040.000.000,00	100 %	1.040.000.000,00	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	KOTA SERANG
						4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PEN GADAAAN BARANG DAN JASA	B. Tingkat Kematangan UKPBJ	22,22 Nilai	26,67 Nilai	0,00	31,11 Nilai	0,00	35,56 Nilai	0,00	40 Nilai	0,00	40 Nilai	0,00	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	KOTA SERANG
						4.01.07.1.02	Pengeblaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Presentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	36 Dokumen %	100 %	950.000.000,00	100 %	980.000.000,00	100 %	980.000.000,00	100 %	1.040.000.000,00	100 %	1.040.000.000,00	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	KOTA SERANG
						4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PEN GADAAAN BARANG DAN JASA	C. Persentase Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	21 Nilai	24,13 Nilai	501.519.285,00	25,43 Nilai	527.987.388,00	27,39 Nilai	517.644.545,00	30 Nilai	588.859.899,00	30 Nilai	588.859.899,00	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	KOTA SERANG
JUMAH							4.829.565.000,00			4.847.602.000,00			4.592.128.000,00		5.050.976.000,00		5.050.976.000,00				

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN DAN PROTOKOL
PROVINSI BANTEN PERIODE 2023-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penangung-jawab	Lokasi			
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026							
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah				Indeks Reformasi Birokrasi		66 Nilai		71 Nilai		76 Nilai		81 Nilai		81 Nilai					
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan				Capaian SAKIP Perangkat Daerah		60 Nilai		65 Nilai		70 Nilai		80 Nilai		80 Nilai					
					4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	6.442.977.000,00	100 %	6.643.896.000,00	100 %	6.251.088.000,00	100 %	6.888.643.000,00	100 %	6.888.643.000,00	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol	Kota Serang	
					4.01.01.101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah	100%	100%	700.000.000,00	100%	750.000.000,00	100%	800.000.000,00	100%	850.000.000,00	100%	850.000.000,00	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol	Kota Serang
					4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	120.000.000,00	100%	125.000.000,00	100%	130.000.000,00	100%	135.000.000,00	100%	135.000.000,00	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol	Kota Serang
					4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	500.000.000,00	100%	550.000.000,00	100%	600.000.000,00	100%	650.000.000,00	100%	650.000.000,00	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol	Kota Serang
					4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	55.000.000,00	100%	60.000.000,00	100%	65.000.000,00	100%	70.000.000,00	100%	70.000.000,00	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol	Kota Serang
					4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	5.067.977.000,00	100%	5.158.896.000,00	100%	4.656.088.000,00	100%	5.183.643.000,00	100%	5.183.643.000,00	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol	Kota Serang

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN DAN PROTOKOL
PROVINSI BANTEN PERIODE 2023-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026								
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				Indeks Reformasi Birokrasi		66 Nilai		71 Nilai		76 Nilai		81 Nilai		81 Nilai						
	Meningkatnya Kualitas Layanan Pimpinan Daerah				Persentase realisasi pelayanan Pimpinan Daerah		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol	Dalam dan Luar Wilayah			
							4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100 %	100 %	9.590.800.000,00	100 %	7.820.680.000,00	100 %	6.412.102.000,00	100 %	8.673.777.000,00	8.673.777.000,00	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol	Dalam dan Luar Wilayah
							4.01.01.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100 %	100 %	9.590.800.000,00	100 %	7.820.680.000,00	100 %	6.412.102.000,00	100 %	8.673.777.000,00	8.673.777.000,00	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol	Dalam dan Luar Wilayah
							4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Capaian Pelayanan Keprotokolan	100 %	100 %	1.858.500.000,00	100 %	1.548.130.000,00	100 %	1.643.785.000,00	100 %	1.808.163.000,00	1.808.163.000,00	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol	Dalam dan Luar Wilayah
							4.01.01.14	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	100 %	100 %	1.858.500.000,00	100 %	1.548.130.000,00	100 %	1.643.785.000,00	100 %	1.808.163.000,00	1.808.163.000,00	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol	Dalam dan Luar Wilayah
JUMLAH								17.892.277.000,00			16.012.706.000,00			14.306.975.000,00			17.370.583.000,00				

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
PROVINSI BANTEN PERIODE 2023-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi			
							Tahun 2023				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah				Indeks Reformasi Birokrasi		66 Nilai		71 Nilai		76 Nilai		81 Nilai		81 Nilai					
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan				Capaian SAKIP Perangkat Daerah		60 Nilai		65 Nilai		70 Nilai		80 Nilai		80 Nilai					
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	26.027.369.500,00	100 %	26.218.103.000,00	100 %	26.245.103.000,00	100 %	26.272.103.000,00	100 %	26.272.103.000,00	Biro Umum dan Perlengkapan	Kota Serang		
		4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	52.000.000,00	100%	59.000.000,00	100%	66.000.000,00	100%	73.000.000,00	100%	73.000.000,00	Biro Umum dan Perlengkapan	Kota Serang		
		4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	640.000.000,00	100 %	660.000.000,00	100 %	680.000.000,00	100 %	700.000.000,00	400 %	700.000.000,00	Biro Umum dan Perlengkapan	Kota Serang		
		4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	25.335.369.500,00	100 %	25.499.103.000,00	100 %	25.499.103.000,00	100 %	25.499.103.000,00	400 %	25.499.103.000,00	Biro Umum dan Perlengkapan	Kota Serang		
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				Indeks Reformasi Birokrasi		66 Nilai		71 Nilai		76 Nilai		81 Nilai		81 Nilai					
	Meningkatnya kualitas pelayanan SETDA				Persentase realisasi pelayanan SETDA			100%		100%		100%		100%		100%		Biro Umum dan Perlengkapan	Kota Serang	
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase capaian tata kelola keuangan dan aset SETDA	100 %	100 %	134.082.054.550,00	100 %	139.579.737.550,00	100 %	141.381.463.550,00	100 %	143.780.606.350,00	100 %	143.780.606.350,00	Biro Umum dan Perlengkapan	Kota Serang		
		4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	100 %	100 %	99.372.513.650,00	100 %	104.870.196.650,00	100 %	110.542.762.650,00	100 %	116.703.957.650,00	400 %	116.703.957.650,00	Biro Umum dan Perlengkapan	Kota Serang		
		4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah	100 %	100 %	103.236.000,00	100 %	103.236.000,00	100 %	103.236.000,00	100 %	103.236.000,00	400 %	103.236.000,00	Biro Umum dan Perlengkapan	Kota Serang		

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
PROVINSI BANTEN PERIODE 2023-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi			
							Tahun 2023				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
				4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	10.399.148.700,00	100 %	10.399.148.700,00	100 %	10.399.148.700,00	100 %	10.399.148.700,00	400 %	10.399.148.700,00	Biro Umum dan Perlengkapan	Kota Serang	
				4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	24.207.156.200,00	100 %	24.207.156.200,00	100 %	20.336.316.200,00	100 %	16.574.264.000,00	400 %	16.574.264.000,00	Biro Umum dan Perlengkapan	Kota Serang	
				4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Capaian Fasilitasi Tiba Usaha	100 %	100 %	15.749.609.400,00	100 %	15.649.609.400,00	100 %	13.172.319.400,00	100 %	13.207.663.100,00	100 %	13.207.663.100,00	Biro Umum dan Perlengkapan	Kota Serang	
				4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	100 %	100 %	15.749.609.400,00	100 %	15.649.609.400,00	100 %	13.172.319.400,00	100 %	13.207.663.100,00	400 %	13.207.663.100,00	Biro Umum dan Perlengkapan	Kota Serang	
				4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian layanan rumah tangga pimpinan daerah dan fasilitasi layanan SETDA	100 %	100 %	36.429.970.550,00	100 %	31.762.110.050,00	100 %	32.208.143.050,00	100 %	30.604.251.550,00	100 %	30.604.251.550,00	Biro Umum dan Perlengkapan	Kota Serang	
				4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	100 %	17.547.844.350,00	100 %	17.547.844.350,00	100 %	17.647.844.350,00	100 %	17.547.844.350,00	400 %	17.547.844.350,00	Biro Umum dan Perlengkapan	Kota Serang	
				4.01.01.1.12	Facilitasi Kerumahagaan Sekretariat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Facilitasi Kerumahagaan Sekretariat Daerah	100 %	100 %	18.882.126.200,00	100 %	14.214.265.700,00	100 %	14.560.298.700,00	100 %	13.056.407.200,00	400 %	13.056.407.200,00	Biro Umum dan Perlengkapan	Kota Serang	
				JUMLAH					212.289.004.000,00		213.209.560.000,00		213.007.029.000,00		213.864.624.000,00		213.864.624.000,00			

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI
PROVINSI BANTEN PERIODE 2023-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
								Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1	Terwujudnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi				Nilai	66 Nilai		71 Nilai		76 Nilai		81 Nilai		81 Nilai				
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah				Nilai	70 Nilai		73 Nilai		77 Nilai		80 Nilai		80 Nilai				
			4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	581.941.000,00	100 %	598.537.000,00	100 %	613.516.946,00	100 %	636.919.705,00	100 %	636.919.705,00	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Provinsi Banten	
			4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	24.400.000,00	100%	24.400.000,00	100%	24.400.000,00	100%	24.400.000,00	100%	24.400.000,00	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Provinsi Banten	
			4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah	100%	100%	5.400.000,00	100%	5.559.168,00	100%	5.559.168,00	100%	5.559.168,00	100%	5.559.168,00	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Provinsi Banten	
			4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaiyah Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaiyah perangkat daerah	100%	100%	65.000.000,00	100%	65.000.000,00	100%	65.000.000,00	100%	65.000.000,00	100%	65.000.000,00	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Provinsi Banten	
			4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	100%	100%	132.169.600,00	100%	130.857.862,00	100%	127.201.809,00	100%	131.036.770,00	100%	131.036.770,00	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Provinsi Banten	
			4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	354.971.400,00	100%	372.719.970,00	100%	391.355.969,00	100%	410.923.767,00	100%	410.923.767,00	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Provinsi Banten	

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI
PROVINSI BANTEN PERIODE 2023-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi			
								Tahun 2023				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi				Nilai	66 Nilai		71 Nilai		76 Nilai		81 Nilai		81 Nilai					
		Meningkatnya Kualitas Kelembagaan yang terukur	Indeks Kelembagaan				Nilai	41 Nilai		50 Nilai		55 Nilai		60 Nilai		60 Nilai		Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Provinsi Banten		
			Kepatuhan Kepatuhan Pelayanan Publik				Nilai	81,81 Nilai		82,87 Nilai		83,94 Nilai		85 Nilai		85 Nilai		Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi			
			Nilai komponen pelaporan SAKIP Provinsi				Nilai	10,77 Nilai		11,17 Nilai		11,6 Nilai		12 Nilai		12 Nilai		Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi			
		4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	4.01.02				Persentase cakupan kegiatan akuntabilitas Kinerja	100 %	100 %	2.997.900.000,00	100 %	2.985.000.000,00	100 %	2.917.668.054,00	100 %	2.988.293.295,00	100 %	2.988.293.295,00	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Provinsi Banten	
							Persentase cakupan kegiatan kelembagaan dan analisis jabatan	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi		
							Persentase cakupan kegiatan Ketatausahaan dan pelayanan publik	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi		
							Persentase cakupan kegiatan reformasi dan Budaya Kerja	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi		
			4.01.02.1.01				Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	100 %	100 %	1.555.000.000,00	100 %	1.540.000.000,00	100 %	1.472.668.054,00	100 %	1.550.000.000,00	100 %	1.550.000.000,00	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi		
			4.01.02.1.02				Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	100 %	100 %	1.442.900.000,00	100 %	1.445.000.000,00	100 %	1.445.000.000,00	100 %	1.438.293.295,00	100 %	1.438.293.295,00	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi		

Sumber Data : Sekretariat Daerah Provinsi Banten

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Provinsi Banten adalah ukuran atas keberhasilan yang dicapai oleh tujuh biro sesuai dengan bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh masing-masing biro. Indikator Kinerja Utama menggambarkan tingkat capaian lingkup tujuan (Sekretariat Daerah) dan lingkup sasaran (Biro-biro). Untuk itu IKU harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah selesaiya kegiatan. Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Banten disajikan pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Banten

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET CAPAIAN				KONDISI AKHIR
			2021	2022*	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks kelembagaan	Nilai	N/A	N/A	41	50	55	60	60
2	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	N/A	N/A	60	71	76	81	81
3	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	47,78	75,05	80,8	86,55	92,95	100	100
4	Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	73,95	80,55	81,81	82,87	83,94	85,00	85,00
5	Nilai komponen pelaporan SAKIP Provinsi	Nilai	9,87	9,95	10,77	11,17	11,6	12	12
6	Percentase realisasi rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah yang di implementasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
7	Percentase Realisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
8	Percentase realisasi pelayanan Pimpinan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
9	Percentase realisasi pelayanan SETDA	Persen	100	100	100	100	100	100	100
10	Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Skor/ Nilai	4,21	4,23	4,24	4,29	4,34	4,39	4,39
11	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	62,60	PM	70	73	77	80	80

Sumber Data : RPD Provinsi Banten

Indikator kinerja Sekretariat Daerah mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan

dan memastikan agar setiap tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja yang tertuang dalam RPD, sehingga terwujud keselarasan antara dokumen RPD dengan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Adapun Indikator kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Banten Tahun 2023 - 2026 disajikan dalam Tabel 7.2.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Mengacu Pada Sasaran Dan Tujuan RPD
Tahun 2023-2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET PEMBANGUNAN				KONDISI AKHIR PERIODE RPD
			2021*	2022**	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	61	63	66	71	76	81	81
2	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persen	14	16	17	18	19	20	20
3	Indeks Williamson	Nilai	0,625	0,623	0,622	0,620	0,619	0,618	0,618
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	4,44	5,00	5,02-5,15	5,11-5,25	5,20-5,33	5,27-5,41	5,27-5,41
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	72,72	73,00	73,27	73,55	73,82	74,10	74,10
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,98	8,82	8,67	8,51	8,36	8,20	8,20
7	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,50	6,25	5,58	5,94	5,43	5,37	5,37
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	64,48	65,00	65,19	65,54	65,89	66,24	66,24
10	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70,02	70,20	70,40	70,54	70,69	70,83	70,83
12	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	91,67	92,79	93,07	93,35	93,63	93,91	93,91
13	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,02	13,50	13,75	13,93	14,12	14,30	14,30
14	Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	8,93	9,00	9,11	9,20	9,30	9,40	9,40
15	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Persen	52,63	53,83	55,03	56,23	57,43	58,63	58,63
16	Indeks Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Poin	48,67	49,00	49,42	50,17	50,92	51,67	51,67
17	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Indeks	3,45	3,46	3,47	3,49	3,51	3,53	3,53
18	Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi	Nilai	65,88	66,37	69,77	73,16	76,56	80	80

Sumber Data : RPD Provinsi Banten

BAB VIII

P E N U T U P

Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023–2026 yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada setiap tahunnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada masing-masing biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Namun Demikian, Sekretariat Daerah Provinsi Banten menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan Renstra ini, agar dapat mendukung pencapaian Visi Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 yaitu, "**Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa**", dapat tercapai dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program atau kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Demikian dokumen Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023–2026 ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat memperkuat pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam RPD Provinsi Banten Tahun 2023–2026.

LAMPIRAN